



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2017



**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat segala limpahan rahmat dan karuniaNya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi Tahun 2017 dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Laporan yang menunjukkan capaian kinerja selama tahun 2017 ini menggambarkan capaian kinerja DPUPR yang dilaksanakan oleh seluruh unit eselon yang ada dengan berdasarkan 11 sasaran, 20 program dan 98 kegiatan yang termuat dalam APBD Kota Bukittinggi Tahun 2017.

LAKIP ini disusun berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Keputusan Ketua LAN RI Nomor 589/IX/6/Y/1999 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah, Surat Keputusan LAN RI Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Penyempurnaan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Permen PAN No. 29 Tahun 2010, Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai implementasi dari visi dan misi Kepala Daerah yang dijabarkan dalam Renstra DPUPR tahun 2016-2021 yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk kegiatan dengan indikator yang terukur. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi telah menyusun Penetapan Kinerja yang ditandatangani bersama Walikota Bukittinggi pada bulan Februari tahun 2017. Penetapan Kinerja ini kemudian dijadikan sebagai dasar acuan dalam mengukur capaian kinerja.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dan dukungan dalam penyusunan laporan ini kami sampaikan penghargaan dan terima kasih, semoga Allah SWT mencatatnya sebagai amal sholeh dan diberikan balasan yang sebaik-baiknya. Amin.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
KOTA BUKITTINGGI

Ir. OKTAVIANUS.MT
NIP. 19631030 199202 1001



RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagai penyelenggara urusan pemerintahan, Setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). *Report on Accountability and Performance of Government Institutions* ini sebagai bentuk pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi SKPD serta kewenangan pengelolaan Sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang telah dirumuskan sebelumnya, hal ini sesuai dengan amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Yang tujuan akhirnya diharapkan akan menciptakan penyelenggaraan negara yang *good governance* dan *clean government*.

LAKIP ini disusun berdasarkan pelaksanaan kegiatan tahun berjalan (2017) yang indikatornya berdasarkan kepada Penetapan Kinerja (TAPKIN) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang telah disepakati pada tahun 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi dengan Walikota Bukittinggi.

Acuan penilaian kinerja ini berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021, dengan visi sebagai berikut:

“Terwujudnya infrastruktur kota dalam rangka mendukung Bukittinggi sebagai kota tujuan pariwisata, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa berlandaskan nilai - nilai agama dan budaya”

Maka untuk mencapai Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan peralatan ke PU an;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur kota untuk mendukung pelayanan publik;



3. Meningkatkan penataan ruang kota serta mengendalikan dan mengarahkan perkembangan pembangunan kota yang berkualitas dan berkesinambungan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kota;
4. Meningkatkan pengelolaan administrasi pertanahan dalam rangka penyediaan informasi, penyelesaian masalah pertanahan dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan pembangunan

Sebagai penjabaran dari visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, maka tujuan yang akan dicapai untuk pembangunan infrastruktur lima tahun kedepan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan reformasi birokrasi
2. Meningkatkan kualitas infrastruktur Jalan dan Jembatan
3. Memberikan rasa aman terhadap bahaya banjir
4. Meningkatnya cakupan air irigasi untuk daerah pertanian
5. Meningkatkan pengelolaan pembangunan gedung
6. Pemenuhan target universal access (sanitasi dan air bersih)
7. Pengendalian dan pemanfaatan ruang kota
8. Meningkatkan pelayanan publik di bidang pertanahan

Sedangkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, akan dicapai dengan beberapa sasaran berikut :

1. Peningkatan kualitas Pengelolaan SAKIP
2. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan
3. Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan
4. Berkurangnya wilayah yang terkena dampak genangan / banjir
5. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana irigasi
6. Meningkatnya mutu dan umur teknis bangunan publik / gedung pemerintah
7. Meningkatnya ketersediaan informasi dan perizinan jasa konstruksi
8. Pemenuhan kebutuhan air bersih
9. Pemenuhan drainase layak
10. Peningkatan penataan ruang dan ketaatan terhadap dokumen tata ruang
11. Terciptanya pelayanan pertanahan yang berkualitas
12. Selesainya konflik-konflik pertanahan pemerintah daerah



Analisis Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bukittinggi pada tahun 2017 terlihat dalam 11 sasaran strategis yang ditiangkan dalam dari 98 buah kegiatan yang terhimpun 20 program, analisis capaian kinerja dimaksud terinci dalam tabel berikut:

**CAPAIAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA BUKITTINGGI
TAHUN 2017**

Sasaran		Rencana a Tingkat Capaian	Realisasi (%)	Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian	Keterangan
URAIAN	Indikator Sasaran				
1	2	3	4	5	6
Urusan Wajib Pekerjaan Umum					
1 Peningkatan Kualitas pengelolaan SAKIP	Nilai SAKIP Dinas PUPR	100,00	41,00	41,00%	Dari Masukan
		100,00	67,00	67,00%	Dari Keluaran
2 Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	Presentase tingkat jalan dan jembatan	92,75	36,38	39,22%	Dari Masukan
		92,75	55,67	60,02%	Dari Keluaran
3 Berkurangnya wilayah yang terkena dampak genangan / banjir	Presentase wilayah / titik yang terkena dampak genangan / banjir	76,67	23,22	30,29%	Dari Masukan
		76,67	17,60	22,96%	Dari Keluaran
4 Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana irigasi	Presentase wilayah cakupan irigasi yang terpenuhi	65,00	8,68	13,35%	Dari Masukan
		65,00	11,24	17,30%	Dari Keluaran
5 Meningkatnya mutu dan umur teknis bangunan publik / gedung pemerintah	Presentase gedung / bangunan yang memenuhi standar layak fungsi	71,25	32,22	45,23%	Dari Masukan
		71,25	35,69	50,09%	Dari Keluaran
6 Meningkatnya ketersediaan informasi dan perizinan jasa	Presentase masyarakat yang membangun sesuai advice planning	20,00	3,71	18,55%	Dari Masukan



konstruksi		yang dikeluarkan				
			20,00	20,00	100,00%	Dari Keluaran
7	Pemenuhan kebutuhan air bersih	- Presentase penduduk yang mendapatkan akses air bersih	65,00	8,00	12,31%	Dari Masukan
		- Pemenuhan drainase layak	65,00	7,00	10,77%	Dari Keluaran
8	Pemenuhan drainase layak	Presentase drainase perkotaan yang layak	80,00	52,00	65,00%	Dari Masukan
			80,00	51,00	63,75%	Dari Keluaran
Urusan Wajib Penataan Ruang						
9	Peningkatan penataan ruang dan ketaatan terhadap dokumen tata ruang	- Kesesuaian pemanfaatan ruang kota	85,83	57,55	67,05%	Dari Masukan
			85,83	73,23	85,32%	Dari Keluaran
		- Pelanggaran pemanfaatan tata ruang yang dapat ditertibkan				
Urusan Wajib Pertanahan						
10	Terciptanya pelayanan pertanahan yang berkualitas	Presentase pelayanan pertanahan sesuai SOP	90,83	54,35	59,84%	Dari Masukan
			90,83	60,00	66,06%	Dari Keluaran
11	Selesainya Konflik-konflik pertanahan pemerintah daerah	Presentase konflik pertanahan pemerintah daerah diselesaikan	90,00	30,67	34,08%	Dari Masukan
			90,00	90,00	100,00%	Dari Keluaran
TOTAL			76,12	31,62	41,54%	Dari Masukan
			76,12	44,40	58,33%	Dari Keluaran

Sumber: Hasil Analisis Rata-rata Capaian



Dari tabel Capaian kinerja DPUPR tahun 2017 dibagi atas 11 sasaran, sedangkan penilaian berdasarkan pada indikator hasil dengan melihat dari dua indikator pembanding, yaitu dari indikator masukan dan keluran. Dari data dapat diketahui bahwa secara keseluruhan capaian kinerja DPU dari sisi masukan rata-rata hanya sebesar 41,54% dengan predikat kurang baik, namun jika dilihat dari sisi keluaran kegiatan capaian kinerja DPU tahun 2017 mencapai 58,33% dengan predikat sedang. Secara umum rendahnya realisasi kegiatan dan keuangan disebabkan oleh banyaknya kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan di Perubahan APBD seperti sisa – sisa DAK tahun berjalan, lokasi yang tidak bebas, dan beberapa kegiatan juga gagal lelang karena tidak adanya penawaran terhadap kegiatan tersebut.

Dari hal ini jika dapat disimpulkan bahwa kedepan perlu dilakukan perencanaan pengalokasian pendanaan secara matang, dengan merencanakan kegiatan berdasarkan output/ hasil yang akan dikeluarkan sehingga kegiatan lebih terarah dan akan menghasilkan hasil yang maksimal dan bukan berorientasi pada seberapa besar dana yang disediakan.

Dalam 11 Indikator sasaran terdapat 19 program dan 87 kegiatan, namun dalam hal ini terdapat beberapa 1-3 program dalam 1 sasaran. Banyak program dan kegiatan dalam sasaran DPUPR tergambar dalam tabel berikut.

JUMLAH PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM SASARAN

NO. URUT SASARAN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN
1	1	2
2	4	19
3	3	6
4	1	4
5	2	9
6	1	4
7	1	14
8	1	4
9	2	19
10	3	6
11	1	1
Jumlah	19	87

Sumber: Hasil Analisis

**PREDIKAT INDIKATOR BERDASARKAN NILAI MASUKAN**

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat	Jumlah Indikator Sasaran	%
1	100%	Sangat Baik	-	-
2	85% sd < 100%	Baik	-	-
3	70% sd < 85%	Sedang	-	-
4	0% sd < 70 %	Kurang Baik	11	100,00
Jumlah			11	100

Sumber: Hasil Analisis

Berdasarkan tabel diatas, Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi pada tahun 2017 jika dilihat dari indikator masukan/Input yaitu berdasarkan dana yang dialokasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan disandingkan dengan realisasi atau serapan anggaran didapat bahwa tidak ada satupun indikator sasaran yang mempunyai predikat sangat baik. Kinerja DPUPR tahun ini dari sisi indikator masukan mengalami penurunan dimana pada Tahun 2016 terdapat 1 sasaran yang berpredikat Baik, 2 sasaran berpredikat Sedang dan 3 sasaran yang berpredikat kurang baik. Sedangkan dari indikator keluaran kinerja DPUPR tahun 2017 juga mengalami sedikit penurunan dari tahun sebelumnya.

PREDIKAT INDIKATOR BERDASARKAN NILAI KELUARAN

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat	Jumlah Indikator Sasaran	%
1	100%	Sangat Baik	2	18,18
2	85% sd < 100%	Baik	1	9,09
3	70% sd < 85%	Sedang	0	0
4	0% sd < 70 %	Kurang Baik	8	72,73
Jumlah			11	100

Sumber: Hasil Analisis



Jika dilihat dari keluaran/output sebagaimana terlihat pada tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja DPU tahun 2017 terdapat 2 sasaran dengan predikat sangat baik, 2 sasaran dengan predikat baik, 1 sasaran dengan predikat sedang dan 6 sasaran dengan predikat kurang baik. Rendahnya capaian kinerja ini dari sisi input atau serapan keuangan dan output disebabkan oleh beberapa hal:

- a. Presentase penduduk yang mendapatkan air bersih merupakan indikator paling rendah dari segi output, disebabkan karena beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan dikarenakan lahan yang belum bebas belum adanya Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pemakaian sisa DAK.
- b. Pada Indikator sasaran no. 7 yaitu Presentase penduduk yang mendapatkan air bersih juga merupakan sasaran yang mempunyai predikat rendah segi input, hal ini disebabkan karena dana di anggarkan di DPA tetapi beberapa kegiatan batal karena beberapa hal seperti masalah lahan dan tidak adanya juklak dan juknis pengerjaan.
- c. Pada Indikator No.4 dari segi Input 13,35% dan dari segi Output 17,30% hal ini dikarenakan beberapa hal seperti untuk Perencanaan DAK Reguler Bidang Irigasi 2018 Dana untuk DAK Tahun 2018 Kota Bukittinggi tidak ada, dan Pemotongan Dana DAK dari Pusat.
- d. Beberapa kegiatan di resian ulang (CCO) karena terdapat bagian pekerjaan yang tidak bisa dilaksanakan karena faktor lahan/tanah sehingga serapan kegiatan tidak bisa maksimal dan output kegiatan tidak terealisasi 100%.
- e. Rendahnya serapan dana, khusus untuk kegiatan belanja Modal dan Barang jasa yang pelaksanaannya dilakukan melalui pelelangan umum disebabkan oleh rendahnya penawaran dari rekanan dari nilai HPS. Dan tentu akan lebih besar jika disandingkan dengan nilai pagu yang disediakan dalam DPA masing-masing kegiatan.

Capaian kinerja juga sangat berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan, yang terlihat dari sejauh mana serapan anggaran yang telah dialokasikan untuk sebuah kegiatan, Akuntabilitas Keuangan DPUPR berdasarkan sasaran strategis dapat tergambar dari tabel berikut:



**REALISASI BELANJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA BUKITTINGGI
TAHUN 2017**

Sasaran				
URAIAN	Indikator Sasaran	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
Urusan Wajib Pekerjaan Umum				
1 Peningkatan kualitas pengelolaan SAKIP	Nilai sakip Dinas PUPR	690.000.000	230.018.646	33%
2 Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan.	Presentase tingkat jalan dan jembatan.	39.157.198.854	28.905.270.865	73,82%
3 Berkurangnya wilayah yang terkena dampak genangan / banjir .	Presentase wilayah / titik yang terkena dampak genangan / banjir.	3.653.615.220	1.974.426.000	54%
4 Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana irigasi	Presentase wilayah cakupan irigasi yang terpenuhi	5.499.347.623	1.288.239.000	23%
5 Meningkatnya mutu dan umur tekhnis bangunan publik / gedung pemerintah	Presentase gedung / bangunan yang memenuhi standar layak fungsi	17.338.396.825	15.094.256.835	88%
6 Meningkatnya ketersediaan informasi dan perizinan jasa konstruksi	Presentase masyarakat yang membangun sesuai advice planning yang dikeluarkan	115.809.775	21.477.705	18.54%
7 Pemenuhan kebutuhan air bersih	-Presentase penduduk yang mendapatkan akses air bersih -Pemenuhan Drainase layak	9.476.463.524	428.662.000	5%



Sasaran		Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
URAIAN	Indikator Sasaran			
1	2	3	4	5
8 Pemenuhan Drainase Layak	Presentase drainase perkotaan yang layak	7.758.835.905	6.442.698.500	83%
Urusan Wajib Penataan Ruang				
9 Peningkatan Penataan Ruang dan ketaatan terhadap dokumen tata ruang	- Kesesuaian pemanfaatan ruang kota - Pelanggaran pemanfaatan tata ruang yang dapat ditertibkan	1.882.905.120	1.426.167.860	75,74%
Urusan Wajib Pertanahan				
1 Terciptanya pelayanan 0 pertanahan yang berkualitas.	Presentase Pelayanan pertanahan sesuai SOP	3.780.460.898	165.895.173	4,39%
1 Selesainya Konflik-konflik 1 pertanahan pemerintah daerah.	Presentase konflik pertanahan pemerintah daerah diselesaikan	387.286.390	131.996.589	34,08%
TOTAL		89.740.320.134	56.109.109.173	62,52%

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa serapan belanja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi hanya mencapai **62,52%**, hal ini tentunya akan berkorelasi terhadap output kegiatan yang dihasilkan. Sehingga kedepan perlu adanya manajemen penganggaran dan pelaksanaan kegiatan yang baik terencana, terukur dan berdasarkan kepada output dan tidak hanya berdasarkan input/atau seberapa besar dana yang disediakan.

**RENCANA DAN REALISASI BELANJA DPUPR TAHUN 2017**

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	PORSENTASE
		(Rp.)	(Rp.)	(%)
B	BELANJA DAERAH	99.789.503.275	64.884.378.253	65,02
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.935.209.501	4.740.128.917	96,05
2.1.1	Belanja Pegawai	4.935.209.501	4.740.128.917	96,05
2.2	BELANJA LANGSUNG	94.854.293.774	60.144.249.336	63,41
2.2.2	Belanja Pegawai	2.392.791.000	1.827.517.228	76,38
2.2.3	Belanja Barang dan Jasa	10.324.107.253	5.422.991.017	52,53
2.2.4	Belanja Modal	82.137.395.521	52.893.741.091	64,40

Realisasi keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pada Tahun 2017 tidak ada yang mencapai nilai 100%, Kurangnya pencapaian 100% keuangan disebabkan hambatan-hambatan/permasalahan yang telah diuraikan di dalam pencapaian indikator sasaran pada analisis pencapaian sasaran strategis akuntabilitas kinerja yang telah dijelaskan sebelumnya.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. DASAR HUKUM.....	1
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	4
1.4. SISTIMATIKA PENULISAN	5
1.5 TUGAS DAN WEWENANG DINAS PEKERJAAN UMUM.....	6
1.6 SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGDAN PENATAAN RUANGDAN PENATAAN RUANG.....	7
1.7 PEGAWAI.....	1
BAB II PERENCANAAN STRATEJIK	6
2.1 VISI DAN MISI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGDAN PENATAAN RUANGDAN PENATAAN RUANGKOTA BUKITTINGGI	7
2.2. TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGDAN PENATAAN RUANGDAN PENATAAN RUANGKOTA BUKITTINGGI	8
2.3 KEBIJAKAN PROGRAM DINAS PU KOTA BUKITTINGGI	10
2.4 RENCANA KINERJA TAHUNAN	14
2.5. PENETAPAN KINERJA	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	19
3. 1 INDIKATOR KINERJA.....	19
3.2 METODOLOGI PENGUKURAN KINERJA	20
3.3 ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA	21
3.4 CAPAIAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGDAN PENATAAN RUANGDAN PENATAAN RUANGKOTA BUKITTINGGI	21
3.5 KENDALA YANG DIHADAPI	256
3.6 AKUNTABILITAS KEUANGAN	27
BAB IV PENUTUP.....	31



LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

TABEL 1. 1	STAF PENDUKUNG MASING-MASING BIDANG	1
TABEL 1. 2	KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN	4
TABEL 1. 3	LATAR BELAKANG PENDIDIKAN PNS	4
TABEL 2.1	TUJUAN DAN SASARAN MENENGAH PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	16
TABEL 2.2	PENETAPAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2017.....	16
TABEL 3. 1	CAPAIAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGDAN PENATAAN RUANGDAN PENATAAN RUANGDAN PENATAAN RUANG KOTA BUKITTINGGI	22
TABEL 3.2	JUMLAH PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM SASARAN	23
TABEL 3.3	PREDIKAT INDIKATOR BERDASARKAN NILAI MASUKAN	24
TABEL 3.4	PREDIKAT INDIKATOR BERDASARKAN NILAI KELUARAN	24
TABEL 3.5	REALISASI BELANJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BUKITTINGGI	28
TABEL 3.6	RENCANA DAN REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA DPUPR TAHUN 2017	30



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1. 1	STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM	7
-------------	--	---



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1	RENCANA STRATEGIS 2016-2021 (Renstra 2016 - 2021)
LAMPIRAN 2	RENCANA KINERJA TAHUNAN 2017 (RKT 2017)
LAMPIRAN 3	PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN 2017 (PKT 2017)
LAMPIRAN 4	PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN 2017 (PPS 2017)



B A B I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagai penyelenggara urusan pemerintahan, Setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). *Report on Accountability and Performance of Government Institutions* ini sebagai bentuk pertanggung jawaban tugas pokok dan fungsi SKPD serta kewenangan pengelolaan Sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang telah dirumuskan sebelumnya, hal ini sesuai dengan amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Yang tujuan akhirnya diharapkan akan menciptakan penyelenggaraan negara yang *good governance* dan *clean government*.

LAKIP ini disusun berdasarkan pelaksanaan kegiatan tahun berjalan (2017) yang indikatornya berdasarkan kepada Penetapan Kinerja (TAPKIN) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi yang telah disepakati pada tahun 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Walikota Bukittinggi.

1.2. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi, mengacu dan didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2004 Nomor 126, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No. 29 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006 – 2025, (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 58);
18. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);
19. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04);



20. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 tahun 2011);
22. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
23. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 32 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2013;
24. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2013;
25. Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 239/IX/6/8/2003 Tahun 2003 tentang Petunjuk Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
26. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: SE/31/M.PAN/XII/2004 Tahun 2004 tentang Penetapan Kinerja.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan LAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi Tahun 2017 dimaksud untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran dengan strategi berupa kebijakan dan program yang terdiri atas kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kota Bukittinggi dan sumber dana lainnya (APBD Provinsi Sumatera Barat, APBN, Bantuan Luar Negeri, dan sumber pendanaan lainnya yang sah) Tahun Anggaran 2017, yang ditujukan kepada Walikota Bukittinggi dan sebagai bahan dukungan untuk penyusunan LAKIP Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2017.

Tujuan penyusunan LAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi tahun 2017 secara umum adalah sebagai perwujudan



akuntabilitas instansi kepada pihak-pihak yang memberikan mandat, dan terciptanya sistem pelaporan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah, serta meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam menjalankan misi. Tujuan akhir dari penyusunan LAKIP yaitu diharapkan dapat terciptanya laporan dan kinerja kepengintahan yang baik (*good governance*).

1.4. SISTIMATIKA PENULISAN

LAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi ini pada dasarnya adalah pengkomunikasian pencapaian kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi selama tahun 2017. Penyusunan LAKIP dimulai dengan menjelaskan Rencana Strategis (Renstra) yang terdiri atas Visi, Misi dan tujuan/sasaran, yang dijabarkan dalam bentuk program/kegiatan. Dan selanjutnya dilakukan sistem pengukuran kinerja antara realisasi sasaran/program/kegiatan dengan rencananya. Yaitu capaian kinerja (*performance result*) tahun 2017 diperbandingkan dengan rencana kinerja (*performance plan*) tahun 2017 sebagai tolak ukur keberhasilan organisasi.

Dengan demikian penyajian LAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan Latar Belakang, Dasar hukum, maksud dan Tujuan penyusunan LAKIP, Sistematika Penulisan, Tugas dan Wewenang Dinas Pekerjaan Umum, Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Pegawai

BAB II PERENCANAAN STRATEGIK



Menjelaskan Visi, Misi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Rencana Kinerja Tahunan serta Penetapan Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menyajikan indikator kinerja, metodologi yang digunakan dalam pengukuran kinerja, analisis pencapaian sasaran strategis, capaian kinerja, kendala yang dihadapi dan akuntabilitas keuangan.

BAB IV PENUTUP

Untuk perbaikan pada masa yang akan datang.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1.5 TUGAS DAN WEWENANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Secara umum penetapan TUPOKSI Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dalam mendukung kebijakan pimpinan daerah dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan yaitu fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangan dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang serta Pertanahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 .



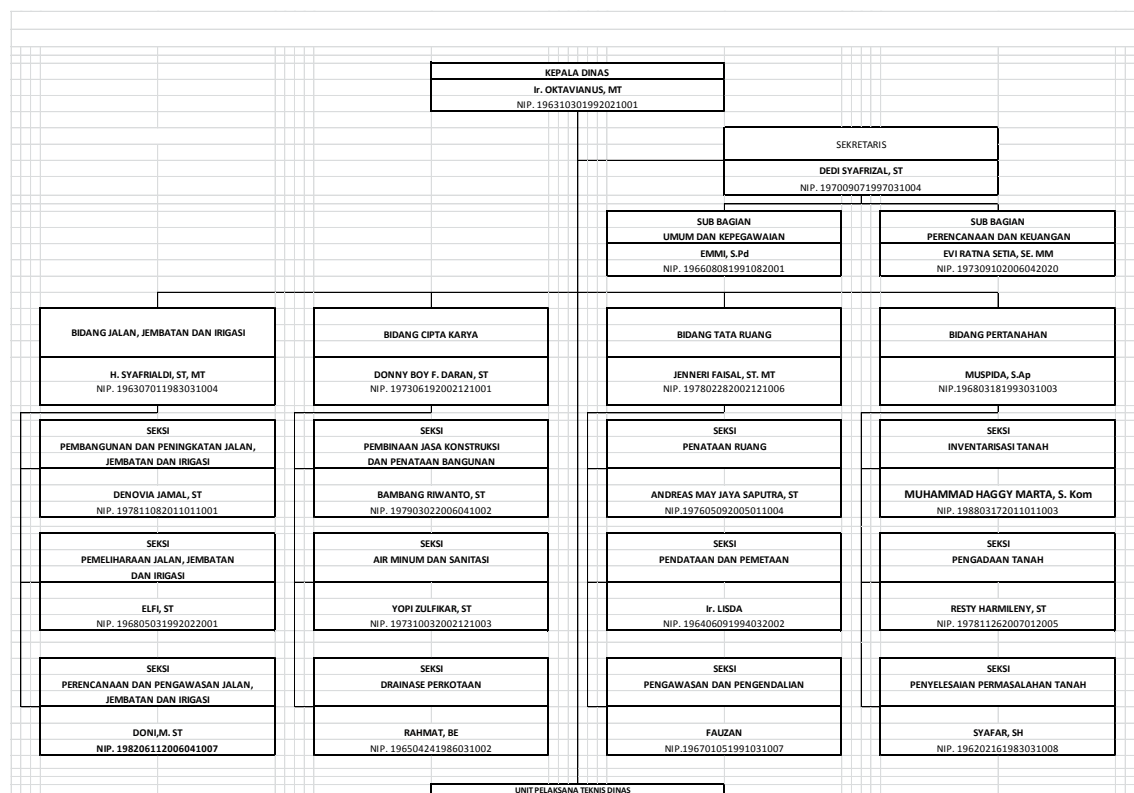
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijaksanaan Teknis di bidang pekerjaan umum, Penataan Ruang dan peratanahan.
2. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanian
3. Pelaksanaan evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
4. Pelaksanaan administrasi dinas
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

1.6 SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGDAN PENATAAN RUANGDAN PENATAAN RUANG.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, mengacu kepada Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangdan Penataan Ruangdan Penataan Ruangdan Penataan Riag Kota Bukittinggi terlihat dalam Gambar berikut:

GAMBAR 1. 1





Sedangkan tugas dan fungsi masing-masing struktural tersebut mengacu kepada Peraturan Walikota Bukittinggi No. 46 Tahun 2009, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Eselon II, III dan Rincian Tugas Eselon IV pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi.

1.7 PEGAWAI

Jumlah sumber daya aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang keadaan tanggal 30 Desember 2017 adalah sebanyak 110 orang yang dibagi atas personil yang menduduki eselon dan staf, dimana PNS yang memiliki eselon terdiri atas 20 orang dan 49 orang staf serta didukung oleh 41 orang tenaga honorer, dengan komposisi seperti tabel 1.1 dan tabel 1.2 sebagai berikut :

TABEL 1. 1
STAF PENDUKUNG MASING-MASING BIDANG

No.	NAMA	STATUS KEP.	No	NAMA	STATUS KEP.
I	SEKRETARIAT				
1.	ROMA DONA PUTRA, ST	PNS	1.	NORA ALVINA	PHL
2.	ZULHELMY NASIR	PNS	2.	ZEICKY CERIA	KONTRAK
3.	JONI ARIANTO, ST	PNS	3.	DARYATA	KONTRAK
4.	REDHO NASLIN, A.Md	PNS	4.	FAHMI DARWIN	KONTRAK
5.	AHMAD TAHARUDDIN	PNS	5.	EFRIYUNARDI	KONTRAK
6.	HARIADI	PNS	6.	HENGKI GUNAWAN	KONTRAK
7.	METRIAMEL (Gudang)	PNS			
8.	SYAFRIJONI	PNS			
9.	BASRI	PNS			
10.	DINA MUHARLINA ARFAN, S.Sos	PNS			
11.	DONNY IRWAN, SE	PNS			
12.	LENI MARLINA, A.Md	PNS			
13.	MUHAMMAD FAUZI ZEN, ST	PNS			
14.	NELVIA FITRI	PNS			
15.	HENDRA SAPUTRA	PNS			
16.	EDI MULYA	PNS			
II.	BIDANG TATA RUANG				
17.	HARZON	PNS	7.	ZUL IRPAN	KONTRAK



No.	NAMA	STATUS KEP.	No	NAMA	STATUS KEP.
18.	IDRUS HAKIMI	PNS	8.	DENY RONALD	KONTRAK
19.	DONI ADMEL	PNS	9.	SEVRISMAN HEKI	KONTRAK
20.	EDITIWARMAN	PNS	10.	FERRY LESMANA	KONTRAK
21.	HERMANSYAH	PNS	11.	ARDIMAN	KONTRAK
22.	IFRIANTO	PNS	12.	RONI JUNAIDI	KONTRAK
			13.	KUS HERLENI	KONTRAK
III.	BIDANG PRASARANA JALAN, JEMBATAN DAN IRIGASI				
23.	AFDAL ADNAN, ST	PNS	14.	ADE INDRA	PHL
24.	SAIFUL MUSTAFA, ST	PNS	15.	T.A. EKA PUTRA	PHL
25.	UTIAR	PNS	16.	ICHWAN RISKI	PHL
26.	MUKLIS	PNS	17.	FERRI O. DHARMA	KONTRAK
27.	YUNAIIDI	PNS	18.	ANDRES	KONTRAK
28.	DELVIA DONA	PNS	19.	AFRIZAL	KONTRAK
29.	HERIYANTO	PNS	20.	YULNAZRI	KONTRAK
30.	RUDY	PNS	21.	IRWANDI	KONTRAK
31.	ASRIL ST. MARAJO	PNS	22.	JIMMY AGFIRSTNA	KONTRAK
32.	AFDALDI YUSUF RIYANTO, ST	PNS	23.	HENGKY PRATAMA	KONTRAK
33.	FEBRIK APAHDIL, A.Md	PNS	24.	JEKY LESMANA	KONTRAK
			25.	DENI PUTRA	KONTRAK
			26.	SURASIM	KONTRAK
			27.	RICCO FITRA	KONTRAK
			28.	AFRIZAL	PHL
			29.	GUSTAMAR	KONTRAK
			30.	EMILSYAH	KONTRAK
			31.	RONI EFENDI	KONTRAK



No.	NAMA	STATUS KEP.	No	NAMA	STATUS KEP.
IV.	BIDANG CIPTA KARYA				
34.	M. SYAHRIL	PNS	32.	SALIM HAVEZ SYAH	KONTRAK
35.	DEDI ERYANTO, ST	PNS	33.	B. St. ASA RAJO	PHL
36.	BENNY ARISTO, ST	PNS	34.	NASWIRLEN	PHL
37.	FITRIA, A.Md	PNS	35.	HUSNUL F. M	KONTRAK
38.	KHAIRUL EKA PUTRA, ST	PNS	36.	EKO WAHYUDI	KONTRAK
39.	RENAWAFIL	PNS	37.	ABDUL HADI	KONTRAK
40.	RIKO	PNS	38.	ZULHENDRA	KONTRAK
41.	SUJAMAL	PNS			
42.	RONI	PNS			
43.	RIKO SALAM	PNS			
44.	IRZAL RISWAN	PNS			
V.	BIDANG PERTANAHAN				
45.	SILLATURAHMAH, ST	PNS	39	ANDRIYANTO	
46.	RONNY KURNIAWAN, A.Md	PNS	40.	DEDY NOVYANDI	
47.	UTIAR	PNS	41.	RENDI YOHANIS	
48.	IRFAN SAPUTRA, A.Md	PNS			
49.	SYAFRIAL	PNS			

Sumber: Bagian Umum DPUPR Bukittinggi, 2017



TABEL 1. 2
KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN

Golongan (Pegawai Negeri/Honor)	Keadaan 30 Des 2017 (orang)	Porsentase (%)
IV	3	2,73%
III	38	34,54%
II	25	22,72%
I	3	2,73%
Honor	41	37,23%
Jumlah	110	100%

Sumber: Bagian Umum DPU Bukittinggi, 2017

Komposisi Pegawai PUPR di Desember Tahun 2017 didominasi oleh PNS yaitu sebanyak 63.36% sedangkan berdasarkan komposisi PNS komposisi paling besar diisi oleh golongan III, sedangkan paling sedikit diisi oleh PNS golongan I.

TABEL 1. 3
LATAR BELAKANG PENDIDIKAN PNS

Pendidikan	Jumlah	Porsentase (%)
S3	0	0,0%
S2	5	7,25%
S1	27	39,13%
D III	8	11,59%
D II	0	0,0%
D I	0	0,0%
SLTA	22	31,88%
SLTP	4	5,80%
SD	3	4,35%
JUMLAH	69	100,0%

Sumber: Bagian Umum DPU Bukittinggi, 2017

Dari 69 personil PNS di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi secara dominan diisi oleh PNS berpendidikan S1& S2 yaitu



sebanyak 46,38% dan berpendidikan SLTA sebanyak 31,88% sedangkan paling sedikit PNS berpendidikan SD sebanyak 3%. Untuk peningkatan kompetensi dan Kualitas SDM Aparatur DPUPR perlu peningkatan penjejangan pendidikan minimal setara S1 dan pengoptimalisasi dalam mengikuti diklat dan pelatihan teknis ke PU an dalam peningkatan kemampuan aparatur dalam upaya pelayanan infrastruktur padamasyarakat.

B A B II

PERENCANAAN STRATEJIK

Lahirnya Undang - undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional, yang didalam pasal 15 ayat (3) menyebutkan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Menyiapkan rancangan Renstra SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada rancangan RPJPD tahun 2004 - 2025. Berdasarkan pasal 19 ayat (4) dinyatakan bahwa Renstra SKPD ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah disesuaikan dengan aturan yang berlaku.

Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi tahun 2016 - 2021 menjadi dasar pijakan bagi aparatur dalam melaksanakan segala aktifitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi untuk 5 (lima) tahun kedepan. Secara substansi Renstra Kota Bukittinggi tahun 2016 - 2021 memuat visi, misi, tujuan, sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Prioritas dan kegiatan yang akan diaktualisasikan dan diimplementasikan oleh seluruh elemen aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi dengan koordinasi terhadap stakeholder kota. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai salah SKPD yang menangani infrastruktur Ke PU an dalam implementasi visi dan misinya tetap mengacu kepada RPJMD dan RTRW Kota Bukittinggi serta renstra K/L Kementerian Pekerjaan Umum, sehingga mampu mengaktualkan kebijakan dalam dokumen tersebut kedalam renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan demikian Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi tidak terlepas dari sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi mempunyai Rencana Strategis (Renstra) yang berorientasi pada keluaran (*out put*) dan hasil (*out comes*) yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu untuk tahun 2016-2021 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.



2.1 VISI DAN MISI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BUKITTINGGI

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut ke mana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Untuk mendukung visi dan program pembangunan Pemerintah Kota Bukittinggi di Bidang ke PU an maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi menetapkan Visi:

“Terwujudnya infrastruktur kota dalam rangka mendukung Bukittinggi sebagai kota tujuan pariwisata, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya”

Makna dari infrastruktur bidang Ke PU an yang merupakan perwujudan dari optimalisasi dan pelayanan bidang ke PU an yang penjabarannya meliputi:

1. Optimalisasi pembangunan infrastruktur adalah peningkatan kapasitas layanan fisik pembangunan sesuai dengan parameter karakteristik sarana prasarana kota.
2. Bidang pekerjaan umum adalah merupakan perangkat sektor pembangunan yang terintegrasi terhadap sektor lainnya.
3. Berkesinambungan adalah merupakan suatu sistem yang saling terkait satu dengan lainnya untuk pencapaian manfaat dan sasaran yang diharapkan.

Maka untuk mencapai Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan peralatan ke PU an
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan Infrastruktur kota untuk mendukung pelayanan publik
3. Meningkatkan penataan ruang kota serta mengendalikan dan mengarahkan perkembangan pembangunan kota yang berkualitas dan berkesinambungan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kota



4. Meningkatkan pengelolaan administrasi pertanahan dalam rangka penyediaan informasi, pengadaan dan penyelesaian masalah pertanahan untuk kepentingan umum dan pembangunan

2.2. TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BUKITTINGGI

Sebagai penjabaran dari visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, maka tujuan yang akan dicapai untuk pembangunan infrastruktur lima tahun kedepan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan reformasi birokrasi
2. Meningkatkan kualitas infrastruktur Jalan dan Jembatan
3. Memberikan rasa aman terhadap bahaya banjir dan genangan
4. Meningkatnya cakupan air irigasi untuk daerah pertanian
5. Meningkatkan pengelolaan pembangunan gedung
6. Pemenuhan target universal acces (sanitasi dan air bersih)
7. Pengendalian dan pemanfaatan ruang kota
8. Meningkatkan pelayanan publik dibidang pertanahan

Sedangkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, akan dicapai dengan beberapa sasaran berikut :

1. Peningkatan kualitas pengelolaan SAKIP
2. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan
3. Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan
4. Berkurangnya wilayah yang terkena dampak genangan / banjir
5. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana irigasi
6. Meningkatnya mutu dan umur teknis bangunan publik / gedung pemerintah
7. Meningkatnya ketersediaan informasi dan perizinan jasa konstruksi
8. Pemenuhan kebutuhan air bersih
9. Pemenuhan drainase layak
10. Peningkatan penataan ruang dan ketaatan terhadap dokumen tata ruang
11. Terciptanya pelayanan yang berkualitas
12. Selesainya konflik-konflik pertanahan pemerintah daerah



TABEL 2. 1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan reformasi birokrasi	1. Peningkatan kualitas pengelolaan SAKIP	Nilai SAKIP Dinas PUPR	B	B	B	B	B	B
	2 Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan	Jumlah Laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	5	5	5	5	5	5
2. Meningkatkan kualitas infrastruktur Jalan dan jembatan	3 Meningkatnya · kualitas jalan dan jembatan	Persentase tingkat jalan dan jembatan dengan kondisi baik	85,20%	87,30%	90%	92%	94%	95%
3. Memberikan rasa aman terhadap bahaya banjir dan genangan	4 Berkurangnya · wilayah yang terkena dampak genangan/ banjir.	Persentase wilayah/titik yang terkena dampak genangan/ banjir	100%	85%	85%	70%	55%	40%
4. Meningkatnya cakupan air irigasi untuk daerah pertanian	5 Meningkatnya · kualitas sarana dan prasarana irigasi	persentase wilayah cakupan irigasi yang terpenuhi	98%	98%	98%	98%	98%	97%
5. Meningkatkan pengelolaan pembangunan gedung.	6 Meningkatnyamutu · dan umur teknis bangunan publik/Gedung pemerintah	persentase gedung /bangunan yang memenuhi standar layak fungsi	0%	0%	10%	20%	30%	40%
	7 Meningkatnya · ketersediaan informasi dan perizinan jasa konstruksi	persentase masyarakat yang membangun sesuai advice planning yang dikeluarkan	10%	10%	20%	40%	60%	75%
6. Pemenuhan target universal acces (sanitasi dan air bersih)	8 Pemenuhan · kebutuhan air bersih	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air bersih	90,64 %	90,64%	95,45 %	97%	100 %	100 %
	9 Pemenuhan · drainase layak	Persentase drainase perkotaan yang layak	40%	40%	55%	60%	65%	70%
7. Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Kota.	1 Peningkatan 0 penataan ruang dan · ketaatan terhadap dokumen tata ruang	Kesesuaian pemanfaatan ruang kota	60%	65%	70%	75%	80%	85%
		pelanggaran pemanfaatan tata ruang yang dapat ditertibkan	50%	55%	60%	65%	70%	75%
8 Meningkatkan pelayanan publik di bidang pertanahan.	1 Terciptanya 1 pelayanan · pertanahan yang berkualitas	Persentase pelayanan pertanahan sesuai SOP	-	50%	55%	60%	65%	70%
	1 Selesainya konflik- 2 konflik pertanahan pemerintah daerah	Persentase konflik pertanahan pemerintah daerah diselesaikan	-	35%	40%	45%	55%	60%

2.3 KEBIJAKAN DAN PROGRAM DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BUKITTINGGI

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan adalah kumpulan keputusan yang menentukan secara teliti tentang bagaimana strategi akan tetap dilaksanakan, atau merupakan pedoman pelaksanaan tindakan atau kegiatan tertentu. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil dalam mencapai sasaran.

1. KEBIJAKAN UMUM

Pemerintah Pusat telah merumuskan *new deal* pembangunan ekonomi indonesia yang secara prinsip memuat *triple track strategy*, yaitu *pro growth*, *pro job* dan *pro poor*. Track pertama dilakukan dengan mengutamakan ekspor dan investasi. Track kedua dilakukan dengan menggerakkan sektor riil untuk menciptakan lapangan kerja, sedangkan track ketiga dilakukan dengan merevitalisasi sektor pertanian, kehutanan, dan ekonomi untuk mengurangi kemiskinan. Sejalan dengan prinsip dan strategi pemerintah tersebut maka peran infrastruktur ke PUPR an dalam pembangunan di Kota Bukittinggi pada dasarnya sangat penting dalam mendukung perekonomian masyarakat Kota Bukittinggi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas lingkungan. Hal ini juga harus disesuaikan dan diselaraskan dengan kebijakan dan program pembangunan di RPJMD dan RTRW Kota Bukittinggi yang diharapkan akan menciptakan keselarasan perencanaan dan pembangunan infrastruktur.

Kebijakan umum pembangunan infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi adalah:

1. Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi perkantoran secara efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
2. Mengadakan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kemajuan teknologi dan informasi;



3. Mengirimkan aparatur dan pelaksana jasa konstruksi untuk mengikuti pendidikan, pelatihan, dan sosialisasi jasa konstruksi;
4. Mengadakan dan melakukan pemeliharaan alat-alat berat yang dibutuhkan ;
5. Melakukan penanganan jalan, jembatan dan irigasi sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab;
6. Menyiapkan perencanaan teknis serta mensosialisasikan rencana-rencana pembangunan jalan, jembatan dan irigasi;
7. Melakukan pemetaan terhadap jaringan drainase yang perlu dipelihara, direhabilitasi, dibangun dan ditingkatkan;
8. Meningkatkan kapasitas produksi air baku air minum dengan melakukan inovasi terhadap sumber air untuk air minum;
9. Melakukan pemetaan terhadap daerah yang membutuhkan PJU serta melakukan pembaharuan dan peremajaan terhadap PJU yang sudah tidak layak;
10. Menyiapkan database ke PU an dalam bentuk data spasial (berbasis GIS);
11. Melakukan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat agar memanfaatkan ruang kota sesuai dengan RTRW;
12. Melakukan pendataan terhadap bangunan dalam kota;
13. Melakukan pengembangan informasi pertanahan dengan membuat arsip elektronik;
14. Melakukan mediasi dan pendekatan dengan pihak-pihak yang memiliki konflik pertanahan dengan pemerintah daerah;
15. Melakukan koordinasi dengan instansi lain di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi mengenai kebutuhan tanah dalam rangka pemenuhan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

2. PROGRAM

Pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, perlu didukung oleh beberapa program berdasarkan prioritas pembangunan yang merupakan

penjabaran secara selektif dan tepat dari beberapa klasifikasi program pembangunan. Klasifikasi program tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan aturan tersebut, urusan yang melekat ditugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi untuk tahun 2017 selain katagori non urusan terdapat beberapa urusan wajib yaitu urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Urusan Pertanahan yang tergeneralisasi dalam beberapa program, dan untuk menunjang keberhasilan program tersebut didukung oleh input pendanaan untuk penyelenggaraan kegiatan kegiatan yang telah ditetapkan dalam program tersebut.

A. Non Urusan / Rutin

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan *Outcomenya* adalah Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan *Outcomenya* adalah Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan *Outcomenya* adalah Meningkatnya disiplin aparatur.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan *Outcome* adalah Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan secara berkala dan akuntabel.

B. Urusan Wajib

1. Urusan Wajib Pekerjaan Umum

- a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, dengan *outcomenya* adalah Presentase Jalan dan Jembatan Dalam kota yang berkondisi baik.
- b. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dengan *outcomenya*, meningkatnya kualitas dan kuantitas Jalan Dalam Kota yang berkondisi baik.
- c. Program Pengelolaan Penerangan Jalan Umum, dengan *outcomenya* adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas Lampu Penerangan Jalan Umum



- d. Program Sistim Informasi / Database Jalan Jembatan, dengan *outcomenya* adalah Ketersediaan informasi / data base jalan.
- e. Program Pengendalian Banjir, dengan *outcomenya* adalah Berkurangnya wilayah yang terkena dampak genangan / banjir
- f. Program pengembangan, Pengelolaan & Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya, dengan *aoutcomenya* adalah meningkatnya Presentase sungai yang terpelihara / normalisasi.
- g. Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong, dengan *outcomenya* adalah Berkurangnya titik bahaya longsor.
- h. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan irigasi, Rawa dan jaringan Pengairan lainnya, dengan *outcomenya* adalah meningkatnya kualitas sarana danprasarana irigasi.
- i. Program Pembangunan Sarana Sosial Kemasyarakatan dan Peningkatan Fasilitas Umum, dengan *outcomenya* adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana sosial dan fasilitas umum.
- j. Program Pengelolaan Pembangunan Gedung, dengan *outcomenya* adalah meningkatnya presentase gedung negara yang laik fungsi.
- k. Program Pengaturan Jasa Konstruksi , dengan *outcomenya* adalah Presentase tersedianya layanan informasi jasa konstruksi.
- l. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Ilmbah, dengan *Outcomenya* adalah meningkatnya persentase penduduk yang mendapatkan akses air bersih.
- m. Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong, dengan *Outcomenya* adalah meningkatnya persentase darinase perkotaan dengan kondisi baik

2. Urusan Wajib Penataan Ruang

- a. Program Perencanaan Tata Ruang, dengan *Outcomenya* adalah meningkatnya persentase penyediaan informasi mengenai rencana Tata Ruang (RTR) wilayah
- b. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang, dengan *Outcomenya* adalah meningkatnya ketaatan terhadap tata ruang

3. Urusan Wajib Pertanahan



- a. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan, dengan *Outcomenya* adalah meningkatnya Persentase ketersediaan informasi pertanahan
- b. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dengan *Outcomenya* adalah meningkatnya persentase optimalisasi penataan, penguasaan pemilikan dan penggunaan tanah
- c. Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan, dengan *Outcomenya* adalah meningkatnya persentase kepastian hukum atas tanah aset daerah.

2.4 RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2017 dapat dilihat pada lampiran 1. Rencana Kinerja memuat 3 urusan yaitu Urusan Wajib Pekerjaan Umum dengan 3 (tiga) Sasaran Strategis, Urusan Urusan Wajib Penataan Ruang dengan 2 (dua) Sasaran Strategis dan urusan Wajib Pertanahan dengan 2 (dua) Sasaran Strategis.

Pada dasarnya rencana kinerja (*performance plan*) tahun 2017 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi selama tahun 2017. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama 1 (satu) tahun dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun tingkat sasaran. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis merupakan *benchmark* dalam mengukur keberhasilan organisasi dalam upaya pencapaian visi dan misi. Rencana Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi tahun 2017 berdasarkan Penetapan Kinerja Kota Bukittinggi Tahun 2017 secara lengkap disajikan pada lampiran Rencana Kinerja Tahunan (Lampiran 2 : Formulir RKT).

2.5. PENETAPAN KINERJA

Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi berkomitmen dengan sistem akuntabilitas dan transparansi untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun yang dituangkan dalam bentuk Penetapan Kinerja.



Penetapan Kinerja merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam Diktum Ketiga Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Salah satu tujuan Penetapan Kinerja ini adalah sebagai acuan untuk menilai keberhasilan /kegagalan pencapaian dan tujuan organisasi. Penetapan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi Tahun 2017 sebagaimana yang telah disepakati oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Walikota Bukittinggi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL 2.2.
PENETAPAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN 2017



Sasaran			Program	KEGIATAN		Rencana Tingkat Capaian (Target)	KET
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Kegiatan			
1	2	3	4				
Urusan Wajib Pekerjaan Umum							
1 Peningkatan kualitas pengelolaan SAKIP	Nilai Sakip Dinas PUPR	5	23 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	1 Pengadaan Alat Berat	Rp 430.000.000		
				2 Pemeliharaan Alat Berat	Rp 260.000.000		
2 Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	Porsentase tingkat jalan dan jembatan dengan kondisi baik	87,30%	1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	01 Peningkatan Trotoar	Rp 5.999.319.400		
				02 Pembangunan Trotoar	Rp 1.910.698.000		
				03 Peningkatan Jalan Dalam Kota	Rp 5.424.963.950		
				05 Pembangunan Jembatan	Rp 849.971.725		
				06 Pembangunan Box Culvert	Rp 699.060.000		
				09 DAK Penugasan Bidang Jalan (Sisa DAK 2010 - 2015)	Rp 995.649.309		
				12 DAK Penugasan Bidang Jalan (Pendukung Konektifitas DAK 2017)	Rp 16.863.000.000		
				13 Perencanaan Pemeliharaan Berkala Jalan Dalam Kota Bukittinggi (DA 2018)	Rp 250.000.000		
				14 Pembangunan Jalan Konsolidasi By.Pass Kelurahan Pulau Anak Air	Rp 200.000.000		
				16 Pengedaman dan Pengecoran Bahu Jalan Simpang Empat By.Pass Jln. Teja Sukmana	Rp 200.000.000		
				17 Pemindahan Saluran dan Trotoar Simpang By.Pass Surau Gadang	Rp 87.500.000		
			18 Program rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan	01 Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kota	Rp 532.812.320		
				02 Pemeliharaan Rutin Jembatan Dalam Kota	Rp 443.875.360		
				03 Pemeliharaan Rutin Trotoar Dalam Kota	Rp 399.949.010		
			33 Program Pengelolaan Penerangan Lampu Jalan	01 Pemeliharaan Rutin Lampu Penerangan Jalan Umum	Rp 399.999.940		
				02 Penambahan Jaringan Penerangan Jalan Umum	Rp 600.399.840		
				03 Revitalisasi Penerangan Jalan Umum	Rp -		
			22 Program Sistim Informasi / Data Base Jalan Jembatan	03 Database Jalan dan Jembatan Berbasis GIS	Rp 3.300.000.000		
				04 Penyediaan sarana Pengelolaan Peta GIS dan Data Base Kondisi Jalan Kota Bukittinggi	Rp -		
2 Berkurangnya wilayah yang terkena dampak genangan / banjir	Presentase wilayah / titik yang terkena dampak genangan / banjir	85%	28 Program Pengendalian Banjir	01 Peningkatan PePeningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai / Kali	Rp 344.638.185		
				02 Pembuatan Sumur Resapan	Rp 299.989.725		
			26 Program Pengembangan Pengelolaan & Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya	01 Normalisasi Sungai	Rp 550.787.660		



				17	Program Pembangunan Turap / Talud Bronjong	01	Pemasangan Batu Bronjong / Dam Bangunan	Rp	-	
						02	Pemasangan Batu Bronjong / Dam Jalan	Rp	2.458.199.650	
3	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana irigasi	Presentase wilayah cakupan irigasi yang ternenuhi	98%	24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	01	Pembangunan Saluran Irigasi	Rp	287.862.675	
						02	Rehab Peningkatan Jaringan Irigasi	Rp	479.985.125	
						03	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi (sisa DAK 2010 - 2015)	Rp	735.499.823	
						06	Saluran Irigasi yang Direhabilitasi dan di bangun	Rp	3.896.000.000	
						07	Perencanaan DAK reguler Bidang Irigasi 2018	Rp	100.000.000	
4	Meningkatnya mutu dan umur teknis bangunan publik / gedung pemerintah	Presentase gedung / bangunan yang memenuhi standar layak fungsi	0%	31	Program Pembangunan Sarana Sosial Kemasyarakatan dan Peningkatan Fasilitas Umum	01	Event-event Daerah dan Nasional	Rp	99.964.400	
						02	Pembangunan Kantor Lurah	Rp	5.221.254.740	
						03	Rehab Kantor Lurah	Rp	841.496.000	
						05	Pembangunan Kantor DPRD Kota Bukittinggi	Rp	149.599.610	
						32	Pembangunan Kembali Rumah Dinas Walikota Bukittinggi	Rp	5.712.024.425	
						33	Pengembangan Rumah Dinas Wakil Walikota Bukittinggi	Rp	2.583.521.535	
						34	Rehab Gedung Parkir Eks. Gloria	Rp	2.227.118.950	
						36	Lanjutan Pemasangan Pagar Lintasan Pacuan Kuda Bukit Ambacang	Rp	210.000.000	
				32	Program Pengelolaan Pembangunan Gedung	01	Operasional Perda Bangunan Gedung	Rp	143.893.235	
						02	Penyusunan Perda	Rp	149.523.930	
	Meningkatnya ketersediaan informasi dan perizinan jasa konstruksi	Presentase masyarakat yang membangun sesuai advice planning yang dikeluarkan	10%	34	Program Pengaturan Jasa Konstruksi	03	Pembinaan Jasa Konstruksi	Rp	115.809.775	
6	Pemenuhan kebutuhan air bersih	Presentase penduduk yang mendapatkan akses air bersih	90,64%	27	Program Pengembangan, Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	11	Pemipaan (SR)) Masyarakat	Rp	436.000.000	
						12	Operasi dan pemeliharaan SPAM Panorama Baru	Rp	63.000.000	
						17	Pembangunan / Peningkatan SPAM Regional	Rp	-	
						18	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum (Sisa DAK 2010 - 2015)	Rp	3.253.602.500	
						28	Pembuatan Sumur Bor	Rp	200.000.000	
						29	Infrastruktur Senilai Perkotaan (DAK 2010 - 2015)	Rp	4.879.539.424	
						30	Pembuatan Sumur Bor dan Sambungan Rumah (SR)	Rp	220.321.600	
						31	Lanjutan Pembangunan Toilet Umum	Rp	424.000.000	



	Pemenuhan drainase layak	Presentase drainase perkotaan yang layak	40%	16	Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong	01	Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong	Rp 5.524.976.795	
						02	Pemeliharaan Rutin Drainase Dalam Kota	Rp 235.477.685	
						03	Peningkatan Drainase	Rp 1.998.381.425	
Urusan Wajib Penataan Ruang									
1	Peningkatan penataan ruang dan ketaatan terhadap dokumen tata ruang	Kesesuaian pemanfaatan ruang kota	65%	36	Program Perencanaan Tata Ruang	03	Pendampingan Penyusunan Perda RDTR Kota Bukittinggi	Rp 400.037.830	
						05	Pengadaan Cetak Peta Tata Ruang	Rp 30.000.000	
						06	Pendataan Bangunan	Rp 329.968.300	
						07	Pengadaan Kelengkapan Studio Tata Ruang	Rp 250.000.000	
						10	RTBL Kawasan Strategis	Rp 441.498.450	
						13	Pembuatan Keterangan Rencana Kota	Rp 49.158.610	
						14	Perubahan Sertifikat Tanah yang terkena pelepasan hak	Rp 85.016.055	
				37	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	01	Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Tentang Pembangunan	Rp 146.681.575	
						02	Audit Pemanfaatan Ruang	Rp 75.544.300	
						03	Pembuatan Billboard Peringatan Dilarang Membangun diatas lereng / tebing	Rp 75.000.000	
Urusan Pertanahan									
1	Meningkatkan pelayanan publik di bidang pertanahan	Presentase pelayanan pertanahan sesuai SOP	50%	01	Program Penataan, Penguasaan Penggunaan dan Pemanfaatan	01	Kegiatan Sertifikasi Aset Pemerintah Daerah	Rp 221.710.950	
						03	Pengadaan Tanah untuk jalan	Rp 33.089.293	
						04	Pengadaan Tanah untuk Kepentingan pemerintah Kota Bukittinggi	Rp 3.499.839.625	
	Selesainya konflik-konflik pertanahan pemerintah daerah	Presentase konflik pertanahan pemerintah daerah diselesaikan	35%	17	Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	01	Kegiatan Penyelesaian Tanah Konsolidasi By.Pass dan Masalah Tanah Masyarakat Lainnya	Rp 387.286.390	
				18	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	01	Kegiatan Pembuatan Arsip Elektronik	Rp 25.821.030	

B A B III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah sebagai salah satu media pertanggungjawaban dari suatu instansi pemerintah yang pada dasarnya merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan atau kegagalan tersebut perlu dilakukan evaluasi kinerja dengan menganalisis akuntabilitas kinerja berupa pengukuran capaian kinerja dengan menetapkan indikator kinerja dan metodologi pengukurannya, dan analisis akuntabilitas keuangan.

3.1 INDIKATOR KINERJA

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja merupakan suatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja. Indikator Kinerja menjadi patokan penilaian keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai visi dan misi organisasi.

Adapun beberapa jenis indikator kinerja yang sering digunakan dalam pelaksanaan pengukuran suatu organisasi :

1. **Indikator Masukan (*input*)** adalah menunjukan segala sesuatu yang diperlukan dalam rangka menghasilkan keluaran (*output*) misalnya sumber daya manusia, dana, waktu, material, teknologi dan lain-lain.
2. **Indikator Proses** adalah segala besaran yang menunjukan upaya yang harus dilakukan dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran, indikator proses menggambarkan perkembangan atau aktifitas yang terjadi atau dilakukan selama pelaksanaan kegiatan berlangsung, khususnya dalam proses mengolah masukan mejandi keluaran.

3. **Indikator Keluaran (*output*)** adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari satu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik.
4. **Indikator Hasil (*outcome*)** adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan dapat terwujud.
5. **Indikator Manfaat (*benefit*)** adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
6. **Indikator Dampak (*impact*)** adalah indikator yang menggambarkan pengaruh dari pencapaian program terhadap masyarakat secara luas. Indikator ini diukur setelah berlalunya kegiatan atau program dalam jangka waktu tertentu.

Oleh karena belum terbentuknya sistem pengukuran kinerja yang baik dalam organisasi, maka pengukuran kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi tahun 2017 ini baru bisa dilaksanakan pada tingkat indikator keluaran (*output*)/ indikator hasil (*outcome*).

3.2 METODOLOGI PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja meliputi proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi, dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Pencapaian setiap indikator kinerja dilakukan dengan metodologi perbandingan capaian kinerja (*performance result*) dengan rencana kinerja (*performance plan*) tahun 2017 sebagai tolak ukur keberhasilan organisasi. Pencapaian setiap indikator tersebut pada tingkat pencapaian target dari kelompok indikator kinerja kegiatan dan sasaran yang telah dituangkan dalam rencana kinerja, berdasarkan sasaran dan program dalam Rencana Strategis. Angka persentase capaian indikator kinerja didapatkan dengan menghitung persentase perbandingan realisasi capaian dengan rencana pada tingkat kegiatan dan selanjutnya pada tingkat sasaran indikator kinerja yang dijadikan acuan adalah tingkat capaian indikator Hasil (*Outcome*)

masing-masing kegiatan pada kelompok sasaran yang termuat dalam dokumen perencanaan.

$$\text{Tingkat Pencapaian Kinerja Sasaran} = \frac{\text{Capaian Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$$

3.3 ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

Evaluasi kinerja berupa analisis pencapaian sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi tahun 2017 dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi setiap indikator kinerja. Persentase hasil capaian dikelompokkan dalam 4 klasifikasi penilaian yaitu :

- Pencapaian indikator kinerja sasaran 100% predikatnya " **Sangat Baik.** "
- Pencapaian indikator kinerja sasaran 85% sampai dengan dibawah 100% predikatnya " **Baik.** "
- Pencapaian indikator kinerja sasaran 70% sampai dengan dibawah 85% predikatnya " **Sedang.** "
- Pencapaian indikator kinerja sasaran 0% sampai dengan dibawah 70% predikatnya " **Kurang Baik.** "

Setiap predikat yang dicapai dari sasaran dan indikator yang telah ditetapkan diberikan penjelasan untuk rasionalisasi dengan kondisi setiap indikator kegiatan.

3.4 CAPAIAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2017

Analisis Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2017 sesuai Tapkin terlihat dalam 11 sasaran strategis sebagai aglomerasi dari 87 buah kegiatan dalam 19 program, analisis capaian kinerja dimaksud terinci dalam tabel berikut:



TABEL 3. 1
CAPAIAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA BUKITTINGGI
TAHUN 2017

Sasaran		Rencana Tingkat Capaian	Realisasi (%)	Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian	Keterangan
URAIAN	Indikator Sasaran				
1	2	3	4	5	6
Urusan Wajib Pekerjaan Umum					
1 Peningkatan Kualitas pengelolaan SAKIP	Nilai SAKIP Dinas PUPR	100,00	41,00	41,00%	Dari Masukan
		100,00	67,00	67,00%	Dari Keluaran
2 Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	Presentase tingkat jalan dan jembatan	92,75	36,38	39,22%	Dari Masukan
		92,75	55,67	60,02%	Dari Keluaran
3 Berkurangnya wilayah yang terkena dampak genangan / banjir	Presentase wilayah / titik yang terkena dampak genangan / banjir	76,67	23,22	30,29%	Dari Masukan
		76,67	17,60	22,96%	Dari Keluaran
4 Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana irigasi	Presentase wilayah cakupan irigasi yang terpenuhi	65,00	8,68	13,35%	Dari Masukan
		65,00	11,24	17,30%	Dari Keluaran
5 Meningkatnya mutu dan umur teknis bangunan publik / gedung pemerintah	Presentase gedung / bangunan yang memenuhi standar layak fungsi	71,25	32,22	45,23%	Dari Masukan
		71,25	35,69	50,09%	Dari Keluaran
6 Meningkatnya ketersediaan informasi dan perizinan jasa konstruksi	Presentase masyarakat yang membangun sesuai advice planning yang dikeluarkan	20,00	3,71	18,55%	Dari Masukan
		20,00	20,00	100,00%	Dari Keluaran
7 Pemenuhan kebutuhan air bersih	- Presentase penduduk yang mendapatkan akses air bersih	65,00	8,00	12,31%	Dari Masukan
	- Pemenuhan drainase layak	65,00	7,00	10,77%	Dari Keluaran
8 Pemenuhan drainase layak	Presentase drainase perkotaan yang layak	80,00	52,00	65,00%	Dari Masukan
		80,00	51,00	63,75%	Dari Keluaran
Urusan Wajib Penataan Ruang					
9 Peningkatan penataan ruang dan ketaatan terhadap dokumen tata ruang	- Kesesuaian pemanfaatan ruang kota	85,83	57,55	67,05%	Dari Masukan
		85,83	73,23	85,32%	Dari Keluaran
	- Pelanggaran pemanfaatan tata ruang yang dapat ditertibkan				
Urusan Wajib Pertanahan					
10 Terciptanya pelayanan pertanahan yang berkualitas	Presentase pelayanan pertanahan sesuai SOP	90,83	54,35	59,84%	Dari Masukan
		90,83	60,00	66,06%	Dari Keluaran
11 Selesainya Konflik-konflik pertanahan pemerintah daerah	Presentase konflik pertanahan pemerintah daerah diselesaikan	90,00	30,67	34,08%	Dari Masukan
		90,00	90,00	100,00%	Dari Keluaran
TOTAL		76,12	31,62	41,54%	Dari Masukan
		76,12	44,40	58,33%	Dari Keluaran

Sumber: Hasil Analisis Rata-rata capaian



Dari tabel Capaian kinerja DPUPR tahun 2017 dibagi atas 11 sasaran, sedangkan penilaian berdasarkan pada indikator hasil dengan melihat dari dua indikator pembanding, yaitu dari indikator masukan dan keluran. Dari data dapat diketahui bahwa secara keseluruhan capaian kinerja DPUPR dari sisi masukan rata-rata hanya sebesar 41,54% dengan predikat kurang baik, namun jika dilihat dari sisi keluran kegiatan capaian kinerja DPUPR tahun 2017 mencapai 58,33% dengan predikat ***kurang baik***. Secara umum rendahnya realisasi kegiatan dan keuangan disebabkan oleh banyaknya kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan seperti sisa – sisa DAK Tahun berjalan, lokasi yang tidak bebas, lokasi berada di fasilitas umum, dan beberapa kegiatan juga gagal lelang karena tidak adanya penawaran terhadap kegiatan tersebut.

Dari hal ini jika dapat disimpulkan bahwa kedepan perlu dilakukan perencanaan pengalokasian pendanaan secara matang, dengan merencanakan kegiatan berdasarkan output/ hasil yang akan dikeluarkan sehingga kegiatan lebih terarah dan akan menghasilkan hasil yang maksimal dan bukan berorientasi pada seberapa besar dana yang disediakan.

Dalam 11 sasaran strategis sebagai aglomerasi dari 87 buah kegiatan dalam 19 program, namun dalam hal ini terdapat beberapa 1-3 program dalam 1 sasaran. Banyak program dan kegiatan dalam sasaran DPUPR tergambar dalam tabel berikut.

TABEL 3.2
JUMLAH PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM SASARAN

NO. URUT SASARAN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN
1	1	2
2	4	19
3	3	6
4	1	4
5	2	9
6	1	4
7	1	14
8	1	4
9	2	19
10	3	6
11	1	1
Jumlah	19	87

Sumber: Hasil Analisis



TABEL 3.3
PREDIKAT INDIKATOR BERDASARKAN NILAI MASUKAN

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat	Jumlah Indikator Sasaran	%
1	100%	Sangat Baik	-	-
2	85% sd < 100%	Baik	-	-
3	70% sd < 85%	Sedang	-	-
4	0% sd < 70 %	Kurang Baik	11	100,00

Sumber: Hasil Analisis

Berdasarkan tabel diatas, Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2017 jika dilihat dari indikator masukan/Input yaitu berdasarkan dana yang dialokasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan disandingkan dengan realisasi atau serapan anggaran didapat bahwa tidak ada satupun indikator sasaran yang mempunyai predikat sangat baik. Kinerja DPUPR tahun ini dari sisi indikator masukan mengalami penurunan dimana pada Tahun 2016 terdapat 1 sasaran yang berpredikat Baik, 2 sasaran berpredikat Sedang dan 3 sasaran yang berpredikat kurang baik. Sedangkan dari indikator keluaran kinerja DPUPR tahun 2017 juga mengalami sedikit penurunan dari tahun sebelumnya.

TABEL 3.4
PREDIKAT INDIKATOR BERDASARKAN NILAI KELUARAN

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat	Jumlah Indikator Sasaran	%
1	100%	Sangat Baik	2	18,18
2	85% sd < 100%	Baik	1	9,09
3	70% sd < 85%	Sedang	0	0
4	0% sd < 70 %	Kurang Baik	8	72,73
Jumlah			11	100

Sumber: Hasil Analisis

Jika dilihat dari keluaran/output sebagaimana terlihat pada tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja DPUPR tahun 2017 terdapat 2 sasaran dengan predikat sangat baik , 1 sasaran dengan predikat baik, 0 sasaran dengan predikat sedang dan 8 sasaran dengan predikat kurang baik. Rendahnya capaian kinerja ini dari sisi input atau serapan keuangan dan output disebabkan oleh beberapa hal:

- a. Presentase penduduk yang mendapatkan air bersih merupakan indikator paling rendah dari segi output, disebabkan karena beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan dikarenakan Lahan yang belum bebas belum adanya Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pemakaian sisa DAK.
- b. Pada Indikator sasaran no. 7 yaitu Presentase penduduk yang mendapatkan air bersih juga merupakan sasaran yang mempunyai predikat rendah segi input , hal ini disebabkan karena dana di anggarkan di DPA tetapi beberapa kegiatan batal karena beberapa hal seperti masalah lahan dan tidak adanya juklak dan juknis pengerjaan.
- c. Pada Indikator No.4 dari segi Input 13,35% dan dari segi Output 17,30% hal ini dikarenakan beberapa hal seperti untuk Perencanaan DAK Reguler Bidang Irigasi 2018 Dana untuk DAK Tahun 2018 Kota Bukittinggi tidak ada, dan Pemotongan Dana DAK dari Pusat.
- d. Beberapa kegiatan di resian ulang (CCO) karena terdapat bagian pekerjaan yang tidak bisa dilaksanakan karena faktor lahan/tanah sehingga serapan kegiatan tidak bisa maksimal dan output kegiatan tidak terealisasi 100%.
- e. Rendahnya serapan dana, khusus untuk kegiatan belanja Modal dan Barang jasa yang pelaksanaannya dilakukan melalui pelelangan umum disebabkan oleh rendahnya penawaran dari rekanan dari nilai HPS. Dan tentu akan lebih besar jika disandingkan dengan nilai pagu yang disediakan dalam DPA masing-masing kegiatan.

3.5 KENDALA YANG DIHADAPI

Beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan dan pembangunan infrastruktur ke PU an pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi adalah:

- a. Daya dukung wilayah yang terbatas untuk menampung pengembangan berbagai fungsi kota, sesuai tuntutan dan kebutuhan. Hal ini terlihat dengan peningkatan kepadatan penduduk, alih fungsi lahan, serta *urban sprawl* sebagai dampak kurangnya komitmen masyarakat dan pemerintah dalam penerapan penataan ruang. Dalam hal penggunaan lahan, sering terjadi benturan antara aturan yang ada dengan desakan kebutuhan masyarakat di lapangan. Keterbatasan lahan juga makin dirasakan, karena posisi Bukittinggi sebagai Kota Pariwisata, Pusat Perdagangan & Jasa, Pendidikan dan Kesehatan, maka Pemerintah Kota Bukittinggi tidak hanya melayani warga Bukittinggi, tetapi juga melayani masyarakat hinterland dan para commuter dari kabupaten dan kota tetangga.
- b. Kurangnya Sosialisasi Perda No. 6 tahun 2011 Tentang RTRW Kota Bukittinggi mengakibatkan terjadinya kesalahan informasi dan perbedaan persepsi penerapan peraturan dilapangan oleh masyarakat maupun aparatur sendiri. Hal ini berakibat terhadap rendahnya implementasi rencana tata ruang dilapangan sebagai akibat timbulnya sedikit gejolak masyarakat terhadap dokumen rencana RTRW terutama terhadap pola ruang dalam guna lahan fungsi Ruang Terbuka Hijau.
- c. Lokasi dan lahan rencana pembangunan yang telah teralokasikan dalam kegiatan 2017 sering terkendala dan tidak bebas, sehingga beberapa kegiatan pembangunan tidak bisa dilaksanakan sepenuhnya, begitu juga pada beberapa lokasi juga lahannya tidak siap yang berakibat terhadap keterlambatan pelaksanaan pembangunan. Kedepan hal ini perlu disikapi dengan membuat skala prioritas dan kepastian pembebasan lokasi, dalam artian bahwa pada tataran usulan pembangunan paling bawah pada musrenbang setiap kegiatan pembangunan yang diusulkan lokasinya harus bebas dan hal ini perlu ditindaklanjuti dengan surat pernyataan dari masyarakat.

- d. Pelaksanaan pembangunan fisik di Pemerintah Kota khususnya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagian besar dimulai pada bulan Agustus, sehingga menyebabkan beberapa kegiatan/pembangunan fisik tidak bisa dilaksanakan karena waktu yang tersedia untuk pembangunan tidak mencukupi. Banyak kegiatan yang dilakukan adendum dan CCO kegiatan sehingga pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan skenario/perencanaan awal. Beberapa kegiatan juga hanya dapat dilakukan sebatas pembuatan dokumen perencanaan. Beberapa hal tersebut bisa/mungkin disebabkan oleh beberapa hal:
- Kurangnya pemahaman aparatur terhadap Implementasi Perpres 70 tahun 2012 sebagai perubahan kedua dari 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa menyebabkan keterlambatan proses pelelangan dan proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
- e. Khusus untuk kegiatan DAK Tahun berjalan kegiatan tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Petunjuk Teknis untuk Pemakaian dana belum ada.
- f. Rendahnya pemahaman aparatur terhadap TUPOKSI masing-masing menyebabkan beberapa kinerja aparatur tidak berjalan dengan baik, sehingga tidak berfungsi optimal dalam mendukung kinerja dalam pencapaian visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi.

3.6 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, pengalokasian belanja diupayakan secara efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel. Oleh karena itu anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 disusun menggunakan *Performance Based Budget System*, yang telah dimulai semenjak Tahun 2002 berdasarkan Kepmendagri No 29 Tahun 2002 yang berorientasi pada hasil dan manfaat yang terukur berdasarkan ukuran kinerja.

Penyusunan APBD Kota Bukittinggi Tahun 2017 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.



Capaian kinerja juga sangat berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan, yang terlihat dari sejauh mana serapan anggaran yang telah dialokasikan untuk sebuah kegiatan, Akuntabilitas Keuangan DPUPR berdasarkan sasaran strategis dapat tergambar dari tabel berikut :

TABEL 3.5
REALISASI BELANJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA BUKITTINGGI
TAHUN 2017

Sasaran		Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
URAIAN	Indikator Sasaran			
1	2	3	4	5
Urusan Wajib Pekerjaan Umum				
1 Peningkatan kualitas pengelolaan SAKIP	Nilai sakip Dinas PUPR	690.000.000	230.018.646	33%
2 Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan.	Presentase tingkat jalan dan jembatan.	39.157.198.854	28.905.270.865	73,82%
3 Berkurangnya wilayah yang terkena dampak genangan / banjir .	Presentase wilayah / titik yang terkena dampak genabgan / banjir.	3.653.615.220	1.974.426.000	54%
4 Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana irigasi	Presentase wilayah cakupan irigasi yang terpenuhi	5.499.347.623	1.288.239.000	23%
5 Meningkatnya mutu dan umur tekhnis bangunan publik / gedung pemerintah	Presentase gedung / bangunan yang memenuhi standar layak fungsi	17.338.396.825	15.094.256.835	88%
6 Meningkatnya ketersediaan informasi dan perizinan jasa konstruksi	Presentase masyarakat yang membangun sesuai advice	115.809.775	21.477.705	18.54%



Sasaran		Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
URAIAN	Indikator Sasaran			
1	2	3	4	5
	planning yang dikeluarkan			
7 Pemenuhan kebutuhan air bersih	-Presentase penduduk yang mendapatkan akses air bersih -Pemenuhan Drainase layak	9.476.463.524	428.662.000	5%
8 Pemenuhan Drainase Layak	Presentase drainase perkotaan yang layak	7.758.835.905	6.442.698.500	83%
Urusan Wajib Penataan Ruang				
9 Peningkatan Penataan Ruang dan ketaatan terhadap dokumen tata ruang	- Kesesuaian pemanfaatan ruang kota - Pelanggaran pemanfaatan tata ruang yang dapat ditertibkan	1.882.905.120	1.426.167.860	75,74%
Urusan Wajib Pertanahan				
1 Terciptanya pelayanan 0 pertanahan yang berkualitas.	Presentase Pelayanan pertanahan sesuai SOP	3.780.460.898	165.895.173	4,39%
1 Selesainya Konflik-konflik 1 pertanahan pemerintah daerah.	Presentase konflik pertanahan pemerintah daerah diselesaikan	387.286.390	131.996.589	34,08%
TOTAL		89.740.320.134	56.109.109.173	62,52%

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa serapan belanja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang hanya mencapai 62,52%, hal ini tentunya akan berkorelasi terhadap output kegiatan yang dihasilkan. Sehingga perlu



kedepan perlu adanya manajemen penganggaran dan pelaksanaan kegiatan yang baik terencana, terukur dan berdasarkan kepada output dan tidak hanya berdasarkan input/atau seberapa besar dana yang disediakan.

TABEL 3.6
RENCANA DAN REASLISASI PENDAPATAN DAN BELANJA DPUPR TAHUN 2017

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	PORSENTASE
		(Rp.)	(Rp.)	(%)
B	BELANJA DAERAH	99.789.503.275	64.884.378.253	65,02
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.935.209.501	4.740.128.917	96,05
2.1.1	Belanja Pegawai	4.935.209.501	4.740.128.917	96,05
2.2	BELANJA LANGSUNG	94.854.293.774	60.144.249.336	63,41
2.2.2	Belanja Pegawai	2.392.791.000	1.827.517.228	76,38
2.2.3	Belanja Barang dan Jasa	10.324.107.253	5.422.991.017	52,53
2.2.4	Belanja Modal	82.137.395.521	52.893.741.091	64,40

Sumber : Subbag Keuangan Sekretariat DPUPR dan hasil Analisis, 2017

Realisasi keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pada Tahun 2017 tidak ada yang mencapai nilai 100%, Kurangnya pencapaian 100% keuangan disebabkan hambatan-hambatan/permasalahan yang akan diuraikan di dalam pencapaian indikator sasaran pada analisis pencapaian sasaran strategis akuntabilitas kinerja.

B A B I V

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2016-2021 merupakan tolok akur/ acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2017 ini. Renstra DPUPR juga merupakan salah satu bentuk penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah Bukittinggi yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang teranggarkan dalam setiap tahun perencanaan.

Pencapaian visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan yang tertuang dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan tanggung jawab seluruh unit eselon yang ada yang telah dituangkan berdasarkan tupoksi masing-masing dalam upaya penyelenggaraan pembangunan, baik itu dalam urusan otonomi daerah maupun urusan wajib yang di emban.

Dalam pencapaian visi dan misi tersebut ditetapkan dalam indikator kinerja yang telah ditetapkan, baik dalam Renstra dan Renja sebagai acuan awal baik dalam DPA yang telah disiapkan. Dalam Hal penyampaian Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP) ini berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan dan diukur dengan realisasi dari target yang telah ditetapkan. Khusus untuk tahun 2017 ini capaian kinerja sasaran DPUPR dari sisi indikator Input hanya sebesar 37,69%, sedangkandari indikator keluaran sebesar 58,33%. Seperti banyaknya kegiatan yang tidak dilaksanakan dikarenakan belum adanya Petunjuk Teknis untuk Pemakian Dana DAK Tahun berjalan, dan permasalahan lahan. Masih kurangnya pemahaman aparaturnya dalam proses pengadaan barang dan jasa dan kurang siapnya lahan pembangunan juga merupakan salah satu penyebab rendahnya pencapaian kinerja DPUPR pada tahun 2017.

Kedepan diharapkan perlu dilakukan beberapa hal seperti kepastian ketersediaan lahan yang telah sesuai dengan peruntukan ruang yang dituju, pemantapan proses pengadaan barang dan jasa serta mematangkan perencanaan penganggaran kegiatan, sehingga pada saat implementasi pembangunan tidak ada lagi kendala dalam proses pembangunan tersebut. Dan yang tak kalah pentingnya adalah perlu dilakukannya percepatan proses pengadaan barang dan jasa, dimana diharapkan pada triwulan I seluruh kegiatan telah masuk pada tahapan pelelangan



serta diupaya peningkatan kuantitas aparatur bersertifikasi sehingga penanganan kegiatan fisik dapat terdistribusi secara proposional.

Diharapkan dengan terpenuhinya hal tersebut diatas, capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kedepan akan lebih baik dan sesuai dengan rencana yang diharapkan.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

PENETAPAN KINERJA

TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sasaran			Program	KEGIATAN			Rencana Tingkat Capaian (Target)	KET
URAIAN	Indikator Kinerja	Rencana Tingkat Capaian		URAIAN	Indikator Kinerja	Satuan		
1	2	3	4					
Urusan Wajib Pekerjaan Umum								
1 Peningkatan kualitas pengelolaan SAKIP	Nilai Sakip Dinas PUPR	5	2 3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinarmargaan	1 Pengadaan Alat Berat	Masukan			
					- SDM	org		
					- DANA	Rp.	Rp 230.018.646	
					Keluaran			
					Jumlah pengadaan alat berat	Jenis	1	
					Hasil			
				2 Pemeliharaan Alat Berat	Alat Berat yang dipelihara dapat melancarkan pelaksanaan pekerjaan ke PU an	%	53	
					Masukan			
					- SDM	org		
					- DANA	Rp.	Rp 188.918.646	
					Keluaran			
					Jumlah pemeliharaan Alat Berat	Jenis	10	
					Hasil			
					Alat Berat yang dipelihara dapat melancarkan pelaksanaan pekerjaan ke PU an	%	73	
2 Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	Porsentase tingkat jalan dan jembatan dengan kondisi baik	87,30 %	1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	0 1 Peningkatan Trotoar	Masukan			
					- SDM	org		
					- DANA	Rp.	Rp 5.999.319.400	
					Keluaran			
					Jumlah Trotoar yang ditingkatkan	Ruas	10	
					Hasil			
					Trotoar Yang berkondisi baik dan sesuai standar	%	87,5	
				0 2 Pembangunan Trotoar	Masukan			
					- SDM	org		
					- DANA	Rp.	Rp 1.910.698.000	



						Keluaran			
						Panjang Trotoar yang dibangun	Ruas	6	
						Hasil			
						Trotoar yang berkondisi baik dan sesuai standar	%	87,5	
					03	Peningkatan Jalan Dalam Kota			
						Masukan			
						- SDM			
						- DANA		Rp 5.424.963.950	
						Keluaran			
						Panjang Jalan yang ditingkatkan	KM	2,2	
						Hasil			
						Jalan Dalam Kota dalam kondisi baik	%	87,5	
					05	Pembangunan Jembatan			
						Masukan			
						- SDM	org		
						- DANA	Rp.	Rp 849.971.725	
						Keluaran			
						Jumlah Jembatan yang dibangun	Unit	1	
						Hasil			
						Jembatan Dalam Kota dalam kondisi baik	%	87,5	
					6	Pembangunan Box Culvert			
						Masukan			
						- SDM	org		Batal
						- DANA	Rp.	Rp -	
						Keluaran			
						Jumlah Box Culvert yang dibangun	paket	0	
						Hasil			
						Berkurangnya titik genangan air	%	0	
					09	DAK Penugasan Bidang Jalan (Sisa DAK 2010 - 2015)			
						Masukan			Batal
						- SDM	org		
						- DANA	Rp.	Rp -	
						Keluaran			
						Panjang Jalan yang diaspal	paket	0	
						Hasil			
						Jalan dalam kondisi baik	%	0	
					12	DAK Penugasan Bidang Jalan (Pendukung Konektivitas DAK 2017)			
						Masukan			
						- SDM	org		
						- DANA	Rp.	Rp 16.863.000.000	



						Keluaran			
						Panjang Jalan yang diaspal ulang	KM	12,22	
						Hasil			
						Ruas Jalan dalam Kondisi Baik	%	87,5	
					1 3	Masukan			
						- SDM	org		
						- DANA	Rp.	Rp 250.000.000	
						Keluaran			
						Dokumen Perencanaan Pemeliharaan Berkala Jalan Dalam Kota Bukittinggi (DAK 2018)	dokumen	2	
						Hasil			
					1 4	Jalan Dalam Kondisi Baik	%	10	
						Masukan			
						- SDM	org		
						- DANA	Rp.	Rp 200.000.000	
						Keluaran			
						Jalan yang dibangun	paket + Dok	3	
						Hasil			
						Jalan Dalam Kota Yang Berkondisi Baik	%	95	
					1 6	Masukan			Batal
						- SDM	org		
						- DANA	Rp.	Rp 200.000.000	
						Keluaran			
						DAK Bidang Infrastruktur Jalan (Sisa DAK 2015) yang dilaksanakan	paket + dok	3	
						Hasil	%	90%	
					1 7	Masukan			
						- SDM	org		
						- DANA	Rp.	Rp 87.500.000	
						Keluaran			
						Pemindahan Saluran dan Trotoar Simpang By.Pass Surau Gadang	paket	1	
						Hasil			
						Saluran dan Trotoar Dalam Kondisi Baik	%	90	
						Masukan			
1 8	Program rehabilitasi	0 1	Rehabilitasi /						



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



2	Berkurangnya wilayah yang terkena dampak genangan / banjir	Presentase wilayah / titik yang terkena dampak genangan / banjir	85%	2	Program Sistem Informasi / Data Base Jalan Jembatan	0	Pembayaran Listrik Rekening PJU	Keluaran			
								Jumlah Jaringan Penerangan Jalan Umum direvitalisasi	Paket	0	
								Hasil			
								Lampu PJU sesuai standar	%	0,0	
								Masukan			
								- SDM	org		
								- DANA	Rp.	Rp 3.300.000.000	
								Keluaran			
								Rekening Listrik PJU yang dibayar	Bulan	12	
								Hasil			
								Lampu PJU yang Berfungsi	%	99,0	
								Masukan			Batal
								- SDM	org		
								- DANA	Rp.	Rp -	
								Keluaran			
								Data Base jalan dan jembatan berbasis GIS	Kawasan	0	
								Hasil			
								Program pembangunan jalan sesuai kondisi ril	%	0	
								Masukan			
								- SDM	org		
								- DANA	Rp.	Rp -	Batal
								Keluaran			
								Panjang Jalan Dalam Kota yang Dilaksanakan Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin	Kawasan	0	
								Hasil			
								menjaga kelancaran arus lalu lintas	%	0	
2	Berkurangnya wilayah yang terkena dampak genangan / banjir	Presentase wilayah / titik yang terkena dampak genangan / banjir	85%	2	Program Pengendalian Banjir	0	Peningkatan PePeningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai / Kali	Masukan			
								- SDM	org		
								- DANA	Rp.	Rp 344.638.185	
								Keluaran			
								Panjang pengerukan Sungai / Kali	M'	2000	
								Hasil			
								Mengurangi titik genangan air	80%	80	
								Masukan			
								- SDM	org		
								- DANA	Rp.	Rp 299.989.725	Batal
0	Pembuatan Sumur Resapan							Keluaran			



3	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana irigasi	Presentase wilayah cakupan irigasi yang terpenuhi	98%	26 Program Pengembangan Pengelolaan & Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya	01 Normalisasi Sungai	Jumlah Sumur Resapan yang dibangun	Unit	1	
						Hasil			
						Berkurangnya titik genangan air	%	80,0	
						Masukan			
						- SDM	org		
						- DANA	Rp.	Rp 550.787.660	Batal
						Keluaran			
						Panjang Sungai yang dinormalisasi	M'	300	
						Hasil			
						Cakupan layanan air bersih perpipaan	%	80	
						Masukan			
						- SDM	org		
						- DANA	Rp.	Rp -	Batal
						Keluaran			
						Pekerjaan Pemasangan Dam Bangunan	Paket	0	
						Hasil			
					02 Pemasangan Batu Bronjong / Dam Jalan	Berkurangnya titik potensial longsor	%	0	
						Masukan			
						- SDM	org		
						- DANA	Rp.	Rp 2.458.199.650	
						Keluaran			
						Panjang Pemasangan Batu Bronjong / dam Jalan	Paket + Dok	14	
						Hasil			
						Berkurangnya titik potensial longsor	%	70	
					01 Pembangunan Saluran Irigasi	Masukan			
						- SDM	org		
						- DANA	Rp.	Rp 287.862.675	
						Keluaran			
						Jumlah Saluran Irigasi dan Pintu Air yang dibangun	Unit	3	
						Hasil			
						Luas areal pertanian yang diairi	%	65	
					02 Rehab Peningkatan Jaringan Irigasi	Masukan			
						- SDM	org		
						- DANA	Rp.	Rp 479.985.125	
						Keluaran			
						Panjang Saluran Irigasi yang direhab / peningkatan	M'	1000	
						Hasil			
						Luas areal pertanian yang diairi	%	65	

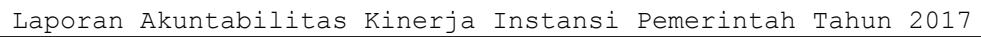


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017

4	Meningkatnya mutu dan umur tekhnis bangunan publik / gedung pemerintah	Presentase gedung / bangunan yang memenuhi standar layak fungsi	0%	3	1	Program Pembangunan Sarana Sosial Kemasyarakatan dan Peningkatan Fasilitas Umum	03	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi (sisa DAK 2010 - 2015)				
							Masukan					
							- SDM	org				
							- DANA	Rp.	Rp 735.499.823	Batal		
							Keluaran					
							Panjang Irigasi yang dibangun	Paket	1			
							Hasil					
							Peningkatan luas areal pertanian yag diairi	%	65			
							06	Saluran Irigasi yang Direhabilitasi dan dibangun				
							Masukan					
							- SDM	org				
							- DANA	Rp.	Rp 3.896.000.000	Batal		
							Keluaran					
							Saluran irigasi yang di rehabilitasi dan dibangun	M + Bendung	2845			
							Hasil					
							Luas Areal pertanian yang diairi	%	65	Batal		
							07	Perencanaaan DAK reguler Bidang Irigasi 2018				
							Masukan					
							- SDM	org				
							- DANA	Rp.	Rp 100.000.000			
							Keluaran					
							Saluran irigasi yang di rehabilitasi dan dibangun	Paket	2			
							Hasil					
							Luas Areal pertanian yang diairi	%	65			
							01	Event-event Daerah dan Nasional				
							Masukan					
							- SDM	org				
							- DANA	Rp.	Rp 99.964.400			
							Keluaran					
							Prasarana penunjang even daerah dan Nasional	Event	5			
							Hasil					
							Event-event Daerah dan nasional dapat berjalan dengan baik	%	80,0			
							02	Pembangunan Kantor Lurah				
							Masukan					
							- SDM	org				
							- DANA	Rp.	Rp 5.221.254.740			
Keluaran												
Jumlah Kantor Lurah yang dibangun	Unit	7										
Hasil												
Tersedianya Kantor Lurah yang representatif	%	100,0										
03	Rehab Kantor											
Masukan												



					Lurah	- SDM	org		
						- DANA	Rp.	Rp. 841.496.000	
						Keluaran			
						Kantor Lurah yang direhab	Paket + Dokumen	3 Paket - 6 Dokumen	
						Hasil			
						Tersedianya Kantor Lurah yang representatif	%	100,0	
				0	Pembangunan Kantor DPRD Kota Bukittinggi	Masukan			
						- SDM	org		
						- DANA	Rp.	Rp. 149.599.610	Batal
						Keluaran			
						Terlaksananya pembangunan kantor DPRD Kota Bukittinggi	Dokumen	2	
						Hasil			
						Tersedianya Kantor DPRD yang representatif	%	40,0	
				3	Pembangunan Kembali Rumah Dinas Walikota Bukittinggi	Masukan			
						- SDM	org		
						- DANA	Rp.	Rp. 5.712.024.425	
						Keluaran			
						Rumah Dinas yang dibangun kembali	Paket + Dokumen + Maket	1	
						Hasil			
						Tersedianya rumah dinas yang representatif	%	100,0	
				3	Pengembangan Rumah Dinas Wakil Walikota Bukittinggi	Masukan			
						- SDM	org		
						- DANA	Rp.	Rp. 2.583.521.535	
						Keluaran			
						Rumah Dinas yang dikembangkan	Unit	1	
						Hasil			
						Tersedianya rumah dinas yang representatif	%	100,0	
				3	Rehab Gedung Parkir Eks. Gloria	Masukan			
						- SDM	org		
						- DANA	Rp.	Rp. 2.227.118.950	
						Keluaran			
						Gedug Parkir yang direhab	Unit	1	
						Hasil			
						Tersedinya Gedung Parkir yang representatif	%	100,0	
				3	Lanjutan Pemasangan Pagar Lintasan	Masukan			
						- SDM	org		



LAMPIRAN



					1 2	Operasi dan pemeliharaan SPAM Panorama Baru	Masukan			
						- SDM	org			
						- DANA	Rp.	Rp 63.000.000		
						Keluaran				
						Kegiatan pembinaan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan	Spam	1		
						Hasil				
						Pengadaan Jasa Konstruksi sesuai aturan	%	65,0		
					1 7	Pembangunan / Peningkatan SPAM Regional	Masukan			
						- SDM	org			Batal
						- DANA	Rp.	Rp -		
						Keluaran				
						Kegiatan pembinaan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan	Lokakarya	0		
						Hasil				
						Pengadaan Jasa Konstruksi sesuai aturan	%	0,0		
					1 8	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum (Sisa DAK 2010 - 2015)	Masukan			
						- SDM	org			
						- DANA	Rp.	Rp 3.253.602.500		Batal
						Keluaran				
						Kegiatan pembinaan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan	Paket	1		
						Hasil				
						Pengadaan Jasa Konstruksi sesuai aturan	%	65,0		
					2 8	Pembuatan Sumur Bor	Masukan			
						- SDM	org			
						- DANA	Rp.	Rp 200.000.000		Batal
						Keluaran				
						Kegiatan pembinaan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan	Paket + Dok	3		
						Hasil				
						Pengadaan Jasa Konstruksi sesuai aturan	%	77,6		
					2 9	Infrastruktur Senilai Perkotaan (DAK 2010 - 2015)	Masukan			
						- SDM	org			
						- DANA	Rp.	Rp 4.879.539.424		Batal
						Keluaran				

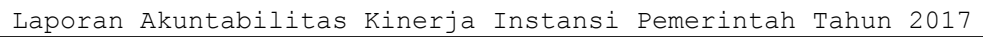


Pemenuhan drainase layak	Presentase drainase perkotaan yang layak	40%	16	Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong	30	Pembuatan Sumur Bor dan Sambungan Rumah (SR)	Kegiatan pembinaan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan	MCK ++ yang dibangun	1	
							Hasil			
							Pengadaan Jasa Konstruksi sesuai aturan	%	55,0	
							Masukan			
							- SDM	org		
							- DANA	Rp.	Rp 220.321.600	Batal
							Keluaran			
							Kegiatan pembinaan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan	KM	180,17	
							Hasil			
							Pengadaan Jasa Konstruksi sesuai aturan	%	100,0	
					31	Lanjutan Pembangunan Toilet Umum	Masukan			
							- SDM	org		
							- DANA	Rp.	Rp 424.000.000	
							Keluaran			
							Kegiatan pembinaan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan	Paket + Dok	2	
							Hasil			
							Pengadaan Jasa Konstruksi sesuai aturan	%	55,0	
					01	Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong	Masukan			
							- SDM	org		
							- DANA	Rp.	Rp 5.524.976.795	
							Keluaran			
							Panjang Saluran Drainase / Gorong-gorong yang dibangun	Paket + Dok	18 + 2	
							Hasil			
							Berkurangnya titik genangan air	%	80	
					02	Pemeliharaan Rutin Drainase Dalam Kota	Masukan			
							- SDM	org		
							- DANA	Rp.	Rp 235.477.685	
							Keluaran			
							Panjang Saluran Drainase / Gorong-gorong yang dipelihara	M'	5700	
							Hasil			
							Berkurangnya titik genangan air	%	80	
					03	Peningkatan Drainase	Masukan			
							- SDM	org		



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017

						- DANA	Rp.	Rp 1.998.381.425	
						Keluaran			
						Panjang Saluran Drainase / Gorong-gorong yang ditingkatkan	Km	1.200	
						Hasil			
						Berkurangnya titik genangan air	%	80	
Urusan Wajib Penataan Ruang									
1	Kesesuaian pemanfaatan ruang kota	65%	3 6	Program Perencanaan Tata Ruang	0 3	Pendampingan Penyusunan Perda RDTR Kota Bukittinggi	Masukan		
Peningkatan penataan ruang dan ketaatan terhadap dokumen tata ruang					0 3	Pendampingan Penyusunan Perda RDTR Kota Bukittinggi	- SDM	org	
							- DANA	Rp.	Rp 400.037.830
							Keluaran		
							Terlaksananya Pendampingan Penyusunan dokumen RDTR	Dokumen	1
							Hasil		
							Presentase kawasan yang sesuai dengan rencana tata ruang	%	90,0
					0 5	Pengadaan Cetak Peta Tata Ruang	Masukan		
							- SDM	org	
							- DANA	Rp.	Rp 30.000.000
							Keluaran		
							Tersedianya Peta Tata Ruang	Unit Peta	4
							Hasil		
							Presentase ketersediaan informasi penataan ruang	%	65,0
					0 6	Pengadaan Bangunan	Masukan		
							- SDM	org	
							- DANA	Rp.	Rp 329.968.300
							Keluaran		
							Terlaksananya Pengadaan Bangunan	Dokumen	1
							Hasil		
							Presentase kawasan yang sesuai dengan rencana tata ruang	%	90,0
					0 7	Pengadaan Kelengkapan Studio Tata Ruang	Masukan		
							- SDM	org	
							- DANA	Rp.	Rp 250.000.000
							Keluaran		
							Terlaksananya Pengadaan Kelengkapan Studio Tata Ruang	Jenis	12
							Hasil		
							Presentase ketersediaan informasi penataan ruang	%	90,0
					1 0	RTBL Kawasan Strategis	Masukan		
							- SDM	org	
							- DANA	Rp.	Rp 441.498.450
							Keluaran		



LAMPIRAN



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017

						Presentase kawasan yang sesuai dengan tata ruang	%	90,0	
				03	Pembuatan Billboard Peringatan Dilarang Membangun diatas lereng / tebing	Masukan			
						- SDM	org		
						- DANA		Rp 75.000.000	
							Rp.		
						Keluaran			
						Jumlah Bilboard yang dibuat	Buah	15	
						Hasil			
						Presentase kawasan lereng / tebing yang dibangun	%	80,0	
Urusan Pertanahan									
1	Meningkatkan pelayanan publik di bidang pertanahan	Presentase pelayanan pertanahan sesuai SOP	50%	01	Program Penataan, Penguasaan Penggunaan dan Pemanfaatan	01	Kegiatan Sertifikasi Aset Pemerintah Daerah		
						Masukan			
						- SDM	org		
						- DANA		Rp 221.710.950	
							Rp.		
						Keluaran			
						Jumlah Sertifikat tanah milik pemerintah yang dapat diselesaikan / diterbitkan	Sertifikat	5	
						Hasil			
						Presentase tanah aset pemerintah bersertifikat	%	90,0	
				03	Pengadaan Tanah untuk jalan	Masukan			
						- SDM	org		
						- DANA		Rp 33.089.293	
							Rp.		
						Keluaran			
						Tersedianya tanah untuk jalan menuju kantor DPRD	Paket	0	
						Hasil			
						Presentase pemenuhan tanah untuk akses jalan	%	95,0	
				04	Pengadaan Tanah untuk kepentingan pemerintahan Kota Bukittinggi	Masukan			
						- SDM	org		
						- DANA		Rp 3.499.839.625	
							Rp.		
						Keluaran			
						Tersedianya tanah untuk kepentingan Pemko Bukittinggi	Paket	1	
						Hasil			
						Presentase pemenuhan tanah untuk pemko	%	90,0	
	Selesai konflik-konflik pertanahan	Presentase konflik	35%	17	Program Penyelesaian	01	Kegiatan Penyelesaian		
						Masukan			



pemerintah daerah	pertanahan pemerintah daerah diselesaikan		n Konflik-konflik Pertanahan	n Tanah Konsolidasi By.Pass dan Masalah Tanah Masyarakat Lainnya	- SDM	org		
					- DANA	Rp.	Rp 387.286.390	
					Keluaran			
					Masalah tanah konsolidasi By.Pass dan Tanah Masyarakat lainnya yang dapat diselesaikan	Tahun	1	
					Hasil			
					Presentase tanah aset pemerintah bersertifikat	%	90,0	
					Masukan			
					- SDM	org		
					- DANA	Rp.	Rp 25.821.030	
					Keluaran			
					Arsip Elektronik	Bundel Arsip	100	
					Hasil			
					Presentase aset tanah dalam bentuk elektronik	%	90,0	



PKK

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN

Instansi : Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi

Program	KEGIATAN			Rencana Tingkat Capaian (Target)	REALISASI	PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	KET
	URAIAN	Indikator Kinerja	Satuan				
4							
2 3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan				Rp 690.000.000	Rp 230.018.646	33%	Serapan Dana
				100	41	41%	Dari Masukan
				100	67	67%	Dari Keluaran
	01 Pengadaan Alat Berat	Masukan					
		- SDM	org				
		- DANA	Rp.	Rp 430.000.000	Rp 41.100.000	10%	
		Keluaran					
		Jumlah Pengadaan Alat Berat	Jenis	3	1	33%	
		Hasil					
		Aat berat yang diadakan dapat membantu kelancaran pelaksanaan pekerjaan ke PU an	%	100	9,56	10%	Dari Masukan
			%	100	33,33	33%	Dari Keluaran
	02 Pemeliharaan Alat Berat	Masukan					
		- SDM	org				
		- DANA	Rp.	Rp 260.000.000	Rp 188.918.646	73%	
		Keluaran					
		Jumlah pemeliharaan Alat Berat	Jenis	10	10	100%	
		Hasil					
		Alat Berat yang dipelihara dapat melancarkan pelaksanaan pekerjaan ke PU an	%	100	72,66	73%	Dari Masukan
			%	100	100,00	100%	Dari Keluaran
1 5 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan				Rp 33.480.162.384	Rp 25.597.737.850	76%	Serapan Dana
				89,32	40,22	45%	Dari Masukan
				89,32	59,81	67%	Dari Keluaran
	01 Peningkatan Trotoar	Masukan					



		- SDM	org				
		- DANA	Rp.	Rp. 5.999.319.400	Rp. 5.455.562.400	91%	
		Keluaran					
		Jumlah Trotoar yang ditingkatkan	Ruas	10	10	100%	
		Hasil					
		Trotoar Yang berkondisi baik dan sesuai standar	%	87,5	79,57	91%	Dari Masukan
			%	87,5	87,5	100%	Dari Keluaran
02	Pembangunan Trotoar						
		Masukan					
		- SDM	org				
		- DANA	Rp.	Rp. 1.910.698.000	Rp. 1.307.171.000	68%	
		Keluaran					
		Panjang Trotoar yang dibangun	Ruas	6	5	83%	
		Hasil					
		Trotoar yang berkondisi baik dan sesuai standar	88%	87,5	59,86	68%	Dari Masukan
			88%	87,5	73	83%	Dari Keluaran
03	Peningkatan Jalan Dalam Kota						
		Masukan					
		- SDM	org				
		- DANA	Rp.	Rp. 5.424.963.950	Rp. 4.484.083.450	83%	
		Keluaran					
		Panjang Jalan yang ditingkatkan	KM	2,2	2,2	100%	
		Hasil					
		Jalan Dalam Kota dalam kondisi baik	%	87,5	72,32	83%	Dari Masukan
			%	87,5	87,5	100%	Dari Keluaran
05	Pembangunan Jembatan						
		Masukan					
		- SDM	org				
		- DANA	Rp.	Rp. 849.971.725	Rp. 217.631.000	26%	
		Keluaran					
		Jumlah Jembatan yang dibangun	Unit	1	1	100%	
		Hasil					
		Jembatan dalam Kota dalam Kondisi Baik	%	87,5	22,40	26%	Dari Masukan
			%	87,5	87,50	100%	Dari Keluaran
06	Pembangunan Box Culvert						
		Masukan					
		- SDM	org				
		- DANA	Rp.	Rp. 699.060.000	Rp. -	0%	Batal



		Keluaran					
		Jumlah Box Culvert yang dibangun	paket	1	0	0%	
		Hasil					
		Berkurangnya titik genangan air	%	80	0,00	0%	Dari Masukan
			%	80	0,00	0%	Dari Keluaran
09	DAK Penugasan Bidang Jalan (Sisa DAK 2010 - 2015)	Masukan					
	- SDM	org					
	- DANA	Rp.	Rp	995.649.309	Rp	0%	Batal
		Keluaran					
	Panjang Jalan yang diaspal	M		800	0	0%	
	Hasil						
	Jalan dalam kondisi baik	%		90	0,00	0%	Dari Masukan
		%		90	0,00	0%	Dari Keluaran
12	DAK Penugasan Bidang Jalan (Pendukung Konektifitas DAK 2017)	Masukan					
	- SDM	org					
	- DANA	Rp.	Rp	16.863.000.000	Rp	83%	
		Keluaran					
	Panjang Jalan yang diaspal ulang	Km		12,22	12,22	100%	
	Hasil						
	Ruas Jalan dalam Kondisi Baik	%		87,5	72,29	83%	Dari Masukan
		%		87,5	87,50	100%	Dari Keluaran
13	Perencanaan Pemeliharaan Berkala Jalan Dalam Kota Bukittinggi (DA 2018)	Masukan					
	- SDM	org					
	- DANA	Rp.	Rp	250.000.000	Rp	20%	
		Keluaran					
	Dokumen Perencanaan Pemeliharaan Berkala Jalan Dalam Kota Bukittinggi (DAK 2018)	dok		2	1	50%	
	Hasil						



		Jalan Dalam Kondisi Baik	%	100	19,98	20%	Dari Masukan
			%	100	50,00	50%	Dari Keluaran
14	Pembangunan Jalan Konsolidasi By.Pass Kelurahan Pulai Anak Air	Masukan					
		- SDM	org				
		- DANA		Rp 200.000.000	Rp 73.004.000	37%	sesuai dengan kondisi lahan
		Keluaran					
		Jalan yang dibangun	Paket +dok	3	3	100%	
		Hasil					
		Jalan Dalam Kota Yang Berkondisi Baik	%	95	34,68	37%	Dari Masukan
			%	95	95,00	100%	Dari Keluaran
16	Pengedaman dan Pengecoran Bahu Jalan Simpang Empat By.Pass Jln. Teja Sukmana	Masukan					Batal
		- SDM	org				
		- DANA		Rp 200.000.000	Rp -	0%	
		Keluaran					
		DAK Bidang Infrastruktur Jalan (Sisa DAK 2015) yang dilaksanakan	paket + Dok	3	0	0%	
		Hasil					
		Jalan Dalam Kota dalam kondisi baik	%	90	0,00	0%	Dari Masukan
			%	90	0,00	0%	Dari Keluaran
17	Pemindahan Saluran dan Trotoar Simpang By.Pass Surau Gadang	Masukan					
		- SDM	org				
		- DANA		Rp 87.500.000	Rp 79.063.000	90%	
		Keluaran					
		Pemindahan Saluran dan Trotoar Simpang By.Pass Surau Gadang	paket	1	1	100%	
		Hasil					



1 8	Program rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan		Saluran dan Trotoar Dalam Kondisi Baik	%	90	81,32	90%	Dari Masukan
				%	90	90,00	100%	Dari Keluaran
					Rp 1.376.636.690	Rp 636.450.907	46%	Serapan Dana
					88	41	47%	Dari Masukan
					88	69	78%	Dari Keluaran
		01	Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kota	Masukan				
			- SDM	org				
			- DANA	Rp.	Rp 532.812.320	Rp 286.174.012	54%	
			Keluaran					
			Pekerjaan Pemeliharaan jalan dalam kota	Bulan	12	12	100%	
			Hasil					
			jalan dalam kondisi baik	%	87,5	47,00	54%	Dari Masukan
				%	87,5	88	100%	Dari Keluaran
		02	Pemeliharaan Rutin Jembatan Dalam Kota	Masukan				
			- SDM	org				
			- DANA	Rp.	Rp 443.875.360	Rp 43.542.415	10%	
			Keluaran					
			Jembatan dalam kota yang direhabilitasi / dipelihara	Unit	31	11	35%	
			Hasil					
			Jembatan dalam kota dalam kondisi baik	%	87,5	8,58	10%	Dari Masukan
				%	87,5	31,05	35%	Dari Keluaran
		03	Pemeliharaan Rutin Trotoar Dalam Kota	Masukan				
			- SDM	org				
			- DANA	Rp.	Rp 399.949.010	Rp 306.734.480	77%	
			Keluaran					
			Pekerjaan Pemeliharaan trotoar dalam kota	Bulan	12	12	100%	
			Hasil					
			Trotoar dalam kondisi baik sesuai standar	%	87,5	67,11	77%	Dari Masukan
3 3	Program Pengelolaan Penerangan Lampu Jalan				Rp 4.300.399.780	Rp 2.671.082.108	62%	Serapan Dana
					94	64	68%	Dari Masukan
					94	94	100%	Dari Keluaran
		01	Pemeliharaan Rutin Lampu Penerangan Jalan Umum	Masukan				
			- SDM	org				
			- DANA	Rp.	Rp 399.999.940	Rp 319.139.715	80%	



2	Program Sistim Informasi / Data Base Jalan Jembatan	Keluaran					
		Pekerjaan pemeliharaan lampu PJU	Bulan	12	12	100%	
		Hasil					
		Lampu Jalan dalam kondisi baik	%	95	75,80	80%	Dari Masukan
			%	95	95,00	100%	Dari Keluaran
		02 Penambahan Jaringan Penerangan Jalan Umum					
		Masukan					
		- SDM	org				
		- DANA	Rp.	Rp 600.399.840	Rp 399.600.000	67%	
		Keluaran					
		Jumlah Jaringan Penerangan Jalan Umum yang ditambah	Paket	5	5	100%	
		Hasil					
		Luas wilayah kota yang tersedia penarangan jalan umum	%	87,5	58,24	67%	Dari Masukan
			%	87,5	87,50	100%	Dari Keluaran
		03 Revitalisasi Penerangan Jalan Umum					
		Masukan					
		- SDM	org				
		- DANA	Rp.	Rp -	Rp -	0%	Batal
		Keluaran					
		Jumlah jaringan penerangan jalan umum direvitalisasi	Paket	0	0	0%	
		Hasil					
		Lampu PJU sesuai standar	%	0	0,00	0%	Dari Masukan
			%	0	0,00	0%	Dari Keluaran
		04 Pembayaran Listrik Rekening PJU					
		Masukan					
		- SDM	org				
		- DANA	Rp.	Rp 3.300.000.000	Rp 1.952.342.393	59%	
		Keluaran					
		Rekening Listrik PJU yang dibayar	Rekening	12	12	100%	
		Hasil					
		Lampu PJU berfungsi	%	100	59,16	59%	Dari Masukan
			%	100	100,00	100%	Dari Keluaran
				Rp 124.600.000	Rp -	0%	Serapan Dana
				100	0	0%	Dari Masukan
				100	0	0%	Dari Keluaran
		03 Database Jalan dan Jembatan Berbasis GIS					
		Masukan					
		- SDM	org				
		- DANA	Rp.	Rp -	Rp -	0%	Batal
		Keluaran					



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017

		Data Base jalan dan jembatan berbasis GIS	KM	0	0	0,00%	
		Hasil					
		Program pembangunan jalan sesuai kondisi ril	%	0	0,00	0,00%	Dari Masukan
			%	0	0,00	0,00%	Dari Keluaran
04	Penyediaan sarana Pengelolaan Peta GIS dan Data Base Kondisi Jalan Kota Bukittinggi	Masukan					
		- SDM	org				
		- DANA	Rp.	Rp 124.600.000	Rp -	0%	Batal
		Keluaran					
		Panjang Jalan Dalam Kota yang Dilaksanakan Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin	Unit	0	0	0%	
		Hasil					
		menjaga kelancaran arus lalu lintas	%	100	0	0%	Dari Masukan
			%	100	0	0%	Dari Keluaran
2	Program Pengendalian Banjir			Rp 644.628.110	Rp 153.440.000	24%	Serapan Dana
8				80	18	22%	Dari Masukan
				80	18	22%	Dari Keluaran
01	Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai / Kali	Masukan					
		- SDM	org				
		- DANA	Rp.	Rp 344.638.385	Rp 153.440.000	45%	
		Keluaran					
		Panjang pengerukan Sungai / Kali	M'	2000	890	45%	
		Hasil					
		Mengurangi titik genangan air	%	80	35,62	45%	Dari Masukan
			%	80	35,60	45%	Dari Keluaran
02	Pembuatan Sumur Resapan	Masukan					
		- SDM	org				
		- DANA	Rp.	Rp 299.989.725	Rp -	0%	Batal
		Keluaran					
		Jumlah sumur resapan yang dibangun	Unit	1	0	0%	
		Hasil					
		Berkurangnya titik genangan air	%	80	0,00	0%	Dari Masukan
			%	80	0,00	0%	Dari Keluaran
2	Program Pengembangan, Pengelolaan & Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya			Rp 550.787.660	Rp -	0%	Serapan Dana
6				80	0	0%	Dari Masukan
				80	0	0%	Dari Keluaran
01	Normalisasi	Masukan					



1 7	Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong	Sungai	- SDM	org				
			- DANA	Rp.	Rp 550.787.660	Rp -	0%	Batal
			Keluaran					
			Panjang sungai yang dinormalisasi	M'	300	0	0%	
			Hasil					
			Mengurangi titik genangan air	%	80	0,00	0%	Dari Masukan
				%	80	0,00	0%	Dari Keluaran
					Rp 2.458.199.650	Rp 1.820.986.000	74%	Serapan Dana
					70	52	74%	Dari Masukan
					70	35	50%	Dari Keluaran
		01 Pemasangan Batu Bronjong / Dam Bangunan	Masukan					
			- SDM	org				
			- DANA	Rp.	Rp -	Rp -	0%	Batal
			Keluaran					
2 4	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya		Pekerjaan Pemasangan Dam Bangunan	Paket	0	0	0,00%	
			Hasil					
			Berkurangnya titik potensial longsor	%	0	0	0,00%	Dari Masukan
				%	0	0	0,00%	Dari Keluaran
		02 Pemasangan Batu Bronjong / Dam Jalan	Masukan					
			- SDM	org				
			- DANA	Rp.	Rp 2.458.199.650	Rp 1.820.986.000	74%	
			Keluaran					
			Panjang Pemasangan Batu Bronjong / dam Jalan	Paket	6	3	50%	
			Hasil					
			Berkurangnya titik potensial longsor	%	70	51,85	74%	Dari Masukan
				%	70	35,00	50%	Dari Keluaran
					Rp 5.499.347.623	Rp 1.288.239.000	23%	Serapan Dana
					65	9	13%	Dari Masukan
					65	11	17%	Dari Keluaran
		01 Pembangunan Saluran Irigasi	Masukan					
			- SDM	org				
			- DANA	Rp.	Rp 287.862.675	Rp 84.273.000	29%	Realisasi hanya untuknpe rencanaan DAK 2017
			Keluaran					
			Jumlah Saluran Irigasi dan Pintu Air yang	Unit	3	2	67%	



		dibangun					
		Hasil					
		Luas areal pertanian yang diairi	%	65	19,03	29%	Dari Masukan
			%	65	43,33	67%	Dari Keluaran
	02 Rehab Peningkatan Jaringan Irigasi	Masukan					
		- SDM	org				
		- DANA	Rp.	Rp 479.985.125	Rp 35.897.000	7%	
		Keluaran					
		Panjang Saluran irigasi yang direhab / peningkatan	M'	1000	40	4%	
		Hasil					
		Luas areal pertanian yang diairi	%	65	4,86	7%	Dari Masukan
			%	65	2,60	4%	Dari Keluaran
	03 DAK Bidang Infrastruktur Irigasi (Sisa DAK 20010 - 2015)	Masukan					
		- SDM	org				
		- DANA	Rp.	Rp 735.499.823	Rp -	0%	Batal
		Keluaran					
		Panjang irigasi yang dibangun	Paket	1	0	0%	
		Hasil					
		Peningkatan luas areal pertanian yang diairi	%	65	0,00	0%	Dari Masukan
			%	65	0,00	0%	Dari Keluaran
	06 Saluran irigasi yang direhabilitasi da dibangun	Masukan					
		- SDM	org				
		- DANA	Rp.	Rp 3.896.000.000	Rp 1.168.069.000	30%	
		Keluaran					
		Saluran irigasi yang direhabilitasi dan dibangun	M + Bend ung	2845	450	16%	
		Hasil					
		Luas areal pertanian yang diairi	%	65	19,49	30%	Dari Masukan
			%	65	10,28	16%	Dari Keluaran
	07 Perencanaan DAK Reguler Bidang Irigasi 2018	Masukan					
		- SDM	org				
		- DANA	Rp.	Rp 100.000.000	Rp -	0%	Batal
		Keluaran					
		Dokumen perencanaan DAK Reguler Bidang Irigasi 2018	Paket	2	0	0%	
		Hasil					
		Peningkatan luas areal pertanian yang diairi	%	65	0,00	0%	Dari Masukan
			%	65	0,00	0%	Dari Keluaran



3 1	Program Pembangunan Sarana Sosial Kemasayarakatan dan Peningkatan Fasilitas Umum				Rp 17.044.979.660	Rp 15.094.256.835	89%	Serapan Dana
					88	64	74%	Dari Masukan
					88	71	82%	Dari Keluaran
	01	Event-event Daerah dan Nasional	Masukan					
		- SDM	org					
		- DANA	Rp.	Rp 99.964.400	Rp 12.018.250	12%		
		Keluaran						
		Prasarana penunjang even daerah dan ansional	Event	5	1	20%		
		Hasil						
		Event-event Daerah dan	%	80	9,62	12%		Dari Masukan
		nasional dapat berjalan dengan baik	%	80	16,00	20%		Dari Keluaran
	02	Pembangunan Kantor Lurah	Masukan					
		- SDM	org					
		- DANA	Rp.	Rp 5.221.254.740	Rp 4.419.470.615	85%		
		Keluaran						
		Jumlah Kantor Lurah yang dibangun	Unit	8	8	100%		
		Hasil						
		Tersedianya Kantor Lurah yang representatif	%	100	84,64	85%		Dari Masukan
			%	100	100,00	100%		Dari Keluaran
	03	Rehab Kantor Lurah	Masukan					
		- SDM	org					
		- DANA	Rp.	Rp 841.496.000	Rp 775.480.000	92%		
		Keluaran						
		Kantor Lurah yang direhab	Unit	4	3	75%		
		Hasil						
		Tersedianya Kantor Lurah yang representatif	%	100	92,15	92%		Dari Masukan
			%	100	75,00	75%		Dari Keluaran
	05	Pembangunan Kantor DPRD Kota Bukittinggi	Masukan					
		- SDM	org					
		- DANA	Rp.	Rp 149.599.610	Rp -	0%		Batal
		Keluaran						
		Terlaksananya pembangunan kantor DPRD Kota Bukittinggi	Unit	1	0	0%		
		Hasil						
		Tersedianya Kantor DPRD yang representatif	%	40	0,00	0%		Dari Masukan
			%	40	0,00	0%		Dari Keluaran



32	Pembangunan Kembali Rumah Dinas Walikota Bukittinggi	Masukan					
		- SDM	org				
		- DANA	Rp.	Rp 5.712.024.425	Rp 5.187.926.220	91%	
		Keluaran					
		Rumah Dinas yang dibangun kembali	Paket + Dokumen + Make t	1	1	100%	
		Hasil					
		Tersedianya rumah dinas yang representatif	%	100	90,82	91%	Dari Masukan
			%	100	100,00	100%	Dari Keluaran
		Masukan					
		- SDM	org				
		- DANA	Rp.	Rp 2.583.521.535	Rp 2.502.075.625	97%	
		Keluaran					
		Rumah Dinas yang dikembangkan	Unit	1	1	100%	
		Hasil					
		Tersedianya rumah dinas yang representatif	%	100	96,85	97%	Dari Masukan
			%	100	100,00	100%	Dari Keluaran
		Masukan					
		- SDM	org				
		- DANA	Rp.	Rp 2.227.118.950	Rp 2.069.836.125	93%	
		Keluaran					
		Gedung yang parkir direhab	Unit	1	1	100%	
		Hasil					
		Tersedianya Gedung Parkir yang representatif	%	100	92,94	93%	Dari Masukan
			%	100	100,00	100%	Dari Keluaran
36	Lanjutan Pemasangan Pagar Lintasan Pacuan Kuda Bukit Ambacang	Masukan					
		- SDM	org				
		- DANA	Rp.	Rp 210.000.000	Rp 127.450.000	61%	
		Keluaran					
		Panjang Pagar Lintasan Pacuan Kuda	M	200	200	100%	
		Hasil					
		Pemenuhan Sarana prasarana kota yang representatif	%	80	48,55	61%	Dari Masukan
			%	80	80,00	100%	Dari Keluaran
32	Program Pengelolaan Pembangunan Gedung			Rp 293.417.165	Rp -	0%	Serapan Dana
				55	0	0%	Dari Masukan



				55	0	0%	Dari Keluaran
01	Operasionalisasi Perda Bangunan Gedung	Masukan					
		- SDM	org				
		- DANA	Rp.	Rp 143.893.235	Rp -	0%	Batal
		Keluaran					
		Jumlah Kegiatan Operasionalisasi terlaksana	9 kali Sidan g. 18 SLF	9	0	0%	
		Hasil					
		Bangunan Gedung sesuai SLF	%	10	0,00	0%	Dari Masukan
			%	10	0,00	0%	Dari Keluaran
02	Penyusunan Perda	Masukan					
		- SDM	org				
		- DANA	Rp.	Rp 149.523.930	Rp -	0%	Batal
		Keluaran					
		Jumlah Ranperda tersusun	Ranperda	1	0	0%	
		Hasil					
		Pembangunan non bangunan gedung sesuai aturan	%	100	0,00	0%	Dari Masukan
			%	100	0,00	0%	Dari Keluaran
3	Program			Rp 115.809.775	Rp 21.477.705	19%	Serapan Dana
4	Pengaturan Jasa Konstruksi			20	3,71	19%	Dari Masukan
				20	20	100%	Dari Keluaran
	03 Pembinaan Jasa Konstruksi	Masukan					
		- SDM	org				
		- DANA	Rp.	Rp 115.809.775	Rp 21.477.705	19%	
		Keluaran					
		Kegiatan pembinaan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan	Loka karya	2	2	100%	
		Hasil					
		Pengadaan Jasa Konstruksi sesuai aturan	%	20	3,71	19%	Dari Masukan
			%	20	20	100%	Dari Keluaran
2	Program			Rp 9.476.463.524	Rp 428.662.000	5%	Serapan Dana
7	Pengembangan, Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah			65	8	12%	Dari Masukan
				65	7	11%	Dari Keluaran
	11 Pemipaan (SR)) Masyarakat	Masukan					
		- SDM	org				
		- DANA	Rp.	Rp 436.000.000	Rp -	0%	Batal



		Keluaran					
		Pemipaan SR Masyarakat	SR	300	0	0%	
		Hasil					
		Cakupan layanan air bersih perpipaan	%	65	0,00	0%	Dari Masukan
			%	65	0,00	0%	Dari Keluaran
12	Operasi dan pemeliharaan SPAM Panorama Baru	Masukan					
		- SDM	org				
		- DANA	Rp.	Rp 63.000.000	Rp 4.978.000	8%	
		Keluaran					
		Operasi dan pemeliharaan SPAM Panorama Baru	Spam	1	0	0%	
		Hasil					
		Cakupan air bersih perpipaan	%	65	5,14	8%	Dari Masukan
			%	65	0,00	0%	Dari Keluaran
17	Pembangunan / Peningkatan SPAM Regional	Masukan					
		- SDM	org				Batal
		- DANA	Rp.	Rp -	Rp -	0%	
		Keluaran					
		Jumlah SPAM yang dibangun	Unit	0	0	0%	
		Hasil					
		Cakupan air bersih non perpipaan	%	0	0,00	0%	Dari Masukan
			%	0	0,00	0%	Dari Keluaran
18	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum (Sisa DAK 2010 - 2015)	Masukan					
		- SDM	org				
		- DANA	Rp.	Rp 3.253.602.500	Rp -	0%	Batal
		Keluaran					
		Penyediaan Sarana Prasarana Bidang Infrastruktur Air Minum	Paket	1	0	0%	
		Hasil					
		Cakupan Layanan Air Bersih	%	65	0,00	0%	Dari Masukan
			%	65	0,00	0%	Dari Keluaran
28	Pembuatan Sumur Bor	Masukan					
		- SDM	org				
		- DANA	Rp.	Rp 200.000.000	Rp -	0%	Batal
		Keluaran					
		Terlaksananya pembuatan sumur bor	Paket + Dok	3	0	0%	
		Hasil					



		Cakupan Layanan air bersih non perpipaan	%	77,6	0,00	0%	Dari Masukan
			%	77,6	0,00	0%	Dari Keluaran
	29	Infrastruktur Sanitasi Perkotaan (DAK 2010 - 2015)	Masukan				
			- SDM	org			
			- DANA	Rp.	Rp 4.879.539.424	Rp -	0%
			Keluaran				Batal
		Tersedianya infrastruktur perkotaan	MCK ++ yang diban gun	1	0	0%	
		Hasil					
		Pemenuhan Sanitasi yang layak	%	65	0,00	0%	Dari Masukan
			%	65	0,00	0%	Dari Keluaran
	30	Pembuatan Sumur Bor dan Sambungan Rumah (SR)	Masukan				
			- SDM	org			
			- DANA	Rp.	Rp 220.321.600	Rp -	0%
			Keluaran				Batal
		Panjang Jalan Dalam Kota yang DilaksanakanReh abilitasi/Pemelih aaraan Rutin	KM	180,17	0	0%	
		Hasil					
		menjaga kelancaran arus lalu lintas	%	65	0,00	0%	Dari Masukan
			%	65	0,00	0%	Dari Keluaran
	31	Lanjutan Pembangunan Toilet Umum	Masukan				
			- SDM	org			
			- DANA	Rp.	Rp 424.000.000	Rp 423.684.000	100%
			Keluaran				
		Lanjutan pembangunan Toilet Umum / Kawasan Wisata Ngarai Maaram dan Benteng Fort de Kock	Paket + Dok	2	2	100%	
		Hasil					
		Terpenuhinya Kebutuhan Toilet Umum yang representatif	100 %	50	49,96	100%	Dari Masukan
			50%	50	50,00	100%	Dari Keluaran
	1 6	Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong		Rp 7.758.835.905	Rp 6.442.698.500	83%	Serapan Dana
				80	52	65%	Dari Masukan
				80	51	64%	Dari Keluaran
	01	Pembangunan Saluran Drainase /	Masukan				
			- SDM	org			



3 6	Program Perencanaan Tata Ruang	Gorong-gorong	- DANA	Rp.	Rp 5.524.976.795	Rp 4.581.798.000	83%	
			Keluaran					
			Panjang Saluran Drainase / Gorong-gorong yang dibangun	Paket + Dok	18	16	89%	
			Hasil					
			Berkurangnya titik genangan air	%	80	66,34	83%	Dari Masukan
				%	80	71,11	89%	Dari Keluaran
		02 Pemeliharaan Rutin Drainase Dalam Kota	Masukan					
			- SDM	org				
			- DANA	Rp.	Rp 235.477.685	Rp 51.247.500	22%	
			Keluaran					
			Panjang Saluran Drainase / Gorong-gorong yang dipelihara	M'	5700	130	2%	
			Hasil					
			Berkurangnya titik genangan air	%	80	17,41	22%	Dari Masukan
				%	80	1,82	2%	Dari Keluaran
		03 Peningkatan Drainase	Masukan					
			- SDM	org				
			- DANA	Rp.	Rp 1.998.381.425	Rp 1.809.653.000	91%	
			Keluaran					
			Panjang Saluran Drainase / Gorong-gorong yang ditingkatkan	KM	1200	1200	100%	
			Hasil					
			Berkurangnya titik genangan air	%	80	72,44	91%	Dari Masukan
				%	80	80,00	100%	Dari Keluaran
					Rp 1.585.679.245	Rp 1.196.016.410	75%	Serapan Dana
					85	51	60%	Dari Masukan
					85	60	70%	Dari Keluaran
		03 Pendampingan Penyusunan Perda RDTR Kota Bukittinggi	Masukan					
			- SDM	org				
			- DANA	Rp.	Rp 400.037.830	Rp 202.538.730	51%	
			Keluaran					
			Terlaksananya Pendampingan Penyusunan dokumen RDTR	Doku men	1	1	100%	
			Hasil					
			Presentase kawasan yang sesuai dengan rencana tata	%	90	45,57	51%	Dari Masukan
				%	90	90,00	100%	Dari Keluaran



ruang						
05	Pengadaan Cetak Peta Tata Ruang	Masukan				
	- SDM	org				
	- DANA	Rp.	Rp 30.000.000	Rp -	0%	Batal
	Keluaran					
	Tersedianya Peta Tata Ruang	Unit Peta	4	0	0%	
	Hasil					
	Presentase ketersediaan informasi	%	95	0,00	0%	Dari Masukan
	penataan ruang	%	95	0,00	0%	Dari Keluaran
06	Pendataan Bangunan	Masukan				
	- SDM	org				
	- DANA	Rp.	Rp 329.968.300	Rp 325.650.900	99%	
	Keluaran					
	Terlaksananya Penndataan Bangunan	Doku men	1	1	100%	
	Hasil					
	Presentase kawsaan yang sesuai dengan rencana tata ruang	%	90	88,82	99%	Dari Masukan
		%	90	90,00	100%	Dari Keluaran
07	Pengadaan Kelengkapan Studio Tata Ruang	Masukan				
	- SDM	org				
	- DANA	Rp.	Rp 250.000.000	Rp 224.087.710	90%	
	Keluaran					
	Terlaksananya Pengadaan Kelengkapan Studio Tata Ruang	Jenis	12	12	100%	
	Hasil					
	Presentase ketersediaan informasi	%	90	80,67	90%	Dari Masukan
	penataan ruang	%	90	90,00	100%	Dari Keluaran
10	RTBL Kawasan Strategis	Masukan				
	- SDM	org				
	- DANA	Rp.	Rp 441.498.450	Rp 390.190.870	88%	
	Keluaran					
	Jumlah dokumen RTBL Kawasan Strategis yang tersusun	Doku men	1	1	100%	
	Hasil					
	Presentase kawasan yang sesuai dengan rencana tata ruang	%	90	79,54	88%	Dari Masukan
		%	90	90,00	100%	Dari Keluaran
13	Pembuatan Keterangan Rencana Kota	Masukan				
	- SDM	org				



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017

		- DANA	Rp.	Rp 49.158.610	Rp 26.829.300	55%	
		Keluaran					
		Terlaksananya Pembuatan Keterangan rencana Kota Hasil	KRK	350	218	62%	
		Presentase Kawasan yang sesuai dengan rencana tata ruang	%	90	49,12	55%	Dari Masukan
			%	90	56,06	62%	Dari Keluaran
	14 Perubahan Sertifikasi Tanah yang Terkena Pelepasan Hak	Masukan					
		- SDM	org				
		- DANA	Rp.	Rp 85.016.055	Rp 26.718.900	31%	
		Keluaran					
		Terlaksananya Perubahan Sertifikat Tanah yang terkena pelepasan hak Hasil	Sertif ikat	60	3	5%	
		Presentase pelepasan tanah hak milik untuk fasilitas umum	%	50	15,71	31%	Dari Masukan
			%	50	2,50	5%	Dari Keluaran
3 7	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang			Rp 297.225.875	Rp 230.151.450	77%	Serapan Dana
				87	64	74%	Dari Masukan
				87	87	100%	Dari Keluaran
		01 Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Tentang Pembangunan	Masukan				
		- SDM	org				
		- DANA	Rp.	Rp 146.681.575	Rp 136.146.950	93%	
		Keluaran					
		Jumlah Razia Bangunan Hasil	Tahu n	1	1	100%	
		Presentase kawasan yang sesuai dengan rencana tata ruang	%	90	83,54	93%	Dari Masukan
			%	90	90,00	100%	Dari Keluaran
		02 Audit Pemanfaatan Ruang	Masukan				
		- SDM	org				
		- DANA	Rp.	Rp 75.544.300	Rp 59.849.500	79%	
		Keluaran					
		Dokumen Audit Pemanfaatan Ruang yang tersusun Hasil	Doku men	1	1	100%	
		Presentase kawasan yang	%	90	71,30	79%	Dari Masukan



		sesuai dengan tata ruang	%	90	90,00	100%	Dari Keluaran
URUSAN PERTANAHAN	03 Pembuatan Billboard Peringatan Dilarang Membangun diatas lereng / tebing	Masukan					
		- SDM	org				
		- DANA	Rp.	Rp 75.000.000	Rp 34.155.000	46%	
		Keluaran					
		Jumlah Billboard yang dibuat	buah	15	15	100%	
		Hasil					
		Presentase kawasan lereng / tebing yang dibangun	%	80	36,43	46%	Dari Masukan
			%	80	80,00	100%	Dari Keluaran
1 Program Penataan, 6 Penguasaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah				Rp 3.754.639.868	Rp 146.546.873	4%	Serapan Dana
				91,67	41,27	45%	Dari Masukan
				91,67	30,00	33%	Dari Keluaran
	01 Kegiatan Sertifikasi Aset Pemerintah Daerah	Masukan					
		- SDM	Org				
		- DANA	Rp.	Rp 221.710.950	Rp 68.127.125	31%	
		Keluaran					
		Jumlah Sertifikat tanah milik pemerintah yang dapat diselesaikan / diterbitkan	Sertifkat	5	5	100%	
		Hasil					
		Presentase tanah aset pemerintah bersertifikat	%	90	27,66	31%	Dari Masukan
			%	90	90,00	100%	Dari Keluaran
	03 Pengadaan Tanah untuk Jalan	Masukan					
		- SDM	org				
		- DANA	Rp.	Rp 33.089.293	Rp 33.080.593	100%	Fisik Batal
		Keluaran					
		Tersedianya tanah untuk jalan menuju kantor DPRD	paket	1	0	0%	
		Hasil					
		Presentase pemenuhan tanah untuk akses jalan	%	95	94,98	100%	Dari Masukan
			%	95	0,00	0%	Dari Keluaran
04 Pengadaan Tanah untuk Kepentingan pemerintah		Masukan					
		- SDM	org				



1 7	Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Kota Bukittinggi	- DANA	Rp.	Rp 3.499.839.625	Rp 45.339.155	1%	Fisik Batal
			Keluaran					
			Tersedianya tanah untuk kepentingan Pemko Bukittinggi	Paket	2	0	0%	
			Hasil					
			Presentase pemenuhan tanah untuk pemko	%	90	1,17	1%	Dari Masukan
				%	90	0,00	0%	Dari Keluaran
					Rp 387.286.390	Rp 131.996.589	34%	Serapan Dana
					90,00	30,67	34%	Dari Masukan
					90,00	90,00	100%	Dari Keluaran
		1 Kegiatan Penyelesaian Tanah Konsolidasi By.Pass dan Masalah Tanah Masyarakat Lainnya	Masukan					
			- SDM	Org				
			- DANA	Rp.	Rp 387.286.390	Rp 131.996.589	34%	
			Keluaran					
			Masalah tanah konsolidasi By.Pass dan Tanah Masyarakat lainnya yang dapat diselesaikan	Tahun	1	1	100%	
			Hasil					
			Presentase penyelesaian tanah konsolidasi By.Pass	%	90	30,67	34%	Dari Masukan
				%	90	90,00	100%	Dari Keluaran
					Rp 25.821.030	Rp 19.348.300	75%	Serapan Dana
					90,00	67,44	75%	Dari Masukan
					90,00	90,00	100%	Dari Keluaran
1 8	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan		Masukan					
			- SDM	Org				
			- DANA	Rp.	Rp 25.821.030	Rp 19.348.300	75%	
			Keluaran					
			Arsip Elektronik	Bundel arsip	400	400	100%	
			Hasil					
			Presentase aset tanah dalam bentuk elektronik	%	90	67,44	75%	Dari Masukan
				%	90	90,00	100%	Dari Keluaran



PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN					
TAHUN 2017					
				FORMULIR : PPS	
Instansi		: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi			
Sasaran		Rencana Tingkat Capaian	Realisasi (%)	Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian	Keterangan
URAIAN	Indikator Sasaran				
1	2	3	4	5	6
Urusan Wajib Pekerjaan Umum					
1 Peningkatan Kualitas pengelolaan SAKIP	Nilai SAKIP Dinas PUPR	100,00	41,00	41,00%	Dari Masukan
		100,00	67,00	67,00%	Dari Keluaran
2 Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	Presentase tingkat jalan dan jembatan	92,75	36,38	39,22%	Dari Masukan
		92,75	55,67	60,02%	Dari Keluaran
3 Berkurangnya wilayah yang terkena dampak genangan / banjir	Presentase wilayah / titik yag terkena dampak genangan / banjir	76,67	23,22	30,29%	Dari Masukan
		76,67	17,60	22,96%	Dari Keluaran
4 Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana irigasi	Presentase wilayah cakupan irigasi yang terpenuhi	65,00	8,68	13,35%	Dari Masukan
		65,00	11,24	17,30%	Dari Keluaran
5 Meningkatnya mutu dan umur tehknis bangunan publik / gedung pemerintah	Presentase gedung / bangunan yang memenuhi standar layak fungsi	71,25	32,22	45,23%	Dari Masukan
		71,25	35,69	50,09%	Dari Keluaran
6 Meningkatnya ketersediaan informasi dan perizinan jasa konstruksi	Presentase masyarakat yang membangun sesuai advice planning yang dikeluarkan	20,00	3,71	18,55%	Dari Masukan
		20,00	20,00	100,00%	Dari Keluaran
7 Pemenuhan kebutuhan air bersih	- Presentase penduduk yang mendapatkan akses air bersih	65,00	8,00	12,31%	Dari Masukan
	- Pemenuhan drainase layak	65,00	7,00	10,77%	Dari Keluaran
8 Pemenuhan drainase layak	Presentase drainase perkotaaan yang layak	80,00	52,00	65,00%	Dari Masukan
		80,00	51,00	63,75%	Dari Keluaran
Urusan Wajib Penataan Ruang					
9 Peningkatan penataan ruang dan ketaatan terhadap dokumen tata ruang	- Kesesuaian pemanfaatan ruang kota	85,83	57,55	67,05%	Dari Masukan
		85,83	73,23	85,32%	Dari Keluaran
	- Pelanggaran pemanfaatan tata ruang yang dapat ditertibkan				
Urusan Wajib Pertanahan					
10 Terciptanya pelayanan pertanahan yang berkualitas	Presentase pelayanan pertanahan sesuai SOP	90,83	54,35	59,84%	Dari Masukan
		90,83	60,00	66,06%	Dari Keluaran
11 Selesaiannya Konflik-konflik pertanahan pemerintah daerah	Presentase konflik pertanahan pemerintah daerah diselesaikan	90,00	30,67	34,08%	Dari Masukan
		90,00	90,00	100,00%	Dari Keluaran
TOTAL		76,12	31,62	41,54%	Dari Masukan
		76,12	44,40	58,33%	Dari Keluaran





RENCANA STRATEJIK DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016 - 2021

SKPD	:	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BUKITTINGGI
VISI	:	Terwujudnya infrastruktur kota dalam rangka mendukung Bukittinggi sebagai kota tujuan pariwisata, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa berlandaskan nilai - nilai agama dan budaya
MISI	:	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan peralatan ke PU an2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur kota untuk mendukung pelayanan publik3. Meningkatkan penataan ruang kota serta mengendalikan dan mengarahkan perkembangan pembangunan kota yang berkualitas dan berkesinambungan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kota4. Meningkatkan pengelolaan administrasi pertanahan dalam rangka penyediaan informasi, pengadaan dan penyelesaian masalah pertanahan untuk kepentingan umum dan pembangunan

NO	TUJUAN	SASARAN		KEBIJAKAN	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
		URAIAN	INDIKATOR			
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan reformasi birokrasi	1. Peningkatan kualitas pengelolaan SAKIP	Nilai SAKIP Dinas PUPR	Mengadakan dan melakukan pemeliharaan alat-alat berat yang dibutuhkan	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Persentase pemenuhan alat berat Kebinamargaan
					Pengadaan alat-alat berat	Jumlah alat berat yang diadakan/ dibeli
					Pemeliharaan alat-alat berat	Jumlah alat berat yang dipelihara
2	Meningkatkan kualitas infrastruktur Jalan dan jembatan	2. Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	Persentase tingkat jalan dan jembatan dengan kondisi baik	- Melakukan penanganan jalan, jembatan dan irigasi sesuai kewenangan dan tanggung jawab	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Panjang Jalan Kota dengan kondisi baik



				Menyiapkan perencanaan teknis serta mensosialisasikan rencana-rencana pembangunan jalan, jembatan dan irigasi	Peningkatan Trotoar	Panjang Trotoar yang ditingkatkan
					Pembangunan Trotoar	Panjang Trotoar yang dibangun
					Peningkatan Jalan Dalam Kota	Panjang jalan yang ditingkatkan
					Pembangunan Jalan Dalam Kota	Panjang jalan yang dibangun
					Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun
					Rehabilitasi Jalan Dalam Kota	Panjang jalan yang direhab
					Pembangunan Box Culvert	Jumlah box culvert yang dibangun
					Pengecoran bahu/ badan jalan	Jumlah bahu/ badan jalan yang dicor
					Penyusunan DED Jalan 2 Jalur Jl. Sudirman dan Jl. Soekarno Hatta	Jumlah DED yang disusun
					Pembangunan Jalan 2 Jalur Jl. Sudirman dan Jl. Soekarno Hatta	Jalan 2 jalur yang dibangun
					Perencanaan DAK Jalan	Jumlah perencanaan Dak jalan yang dikerjakan
					Program rehabilitasi/ pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase peningkatan kualitas jalan dari pemeliharaan
					Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kota	Panjang Jalan Dalam Kota yang di rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin
					Pemeliharaan Rutin Jembatan Dalam Kota	Panjang Jembatan Dalam Kota yang di rehabilitasi/ Pemeliharaan
					Pemeliharaan Rutin Trotoar Dalam Kota	Panjang Jalan trotoar yang di rehabilitasi/ pemeliharaan Rutin



				Melakukan pemetaan terhadap daerah yang membutuhkan PJU serta melakukan pembaharuan dan peremajaan terhadap PJU yang sudah tidak layak	Program Pengelolaan Penerangan Jalan Umum	Persentase wilayah/ jalan dengan penerangan jalan lengkap	
					Pemeliharaan Rutin Lampu Penerangan Jalan Umum	Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum yang dipelihara	
					Penambahan Jaringan Penerangan Jalan Umum	Jumlah Jaringan Penerangan Jalan Umum yang ditambah/ direvitalisasi	
					Revitalisasi Jaringan Penerangan Jalan Umum	Jumlah Jaringan Penerangan Jalan Umum yang ditambah/ direvitalisasi	
					Pembayaran Listrik Rekening PJU	Rekening Listrik PJU yang dibayar	
					Program Sistim Informasi / Database Jalan Jembatan	Tingkat ketersediaan informasi/data base jalan	
					Leger Jalan Kota Bukittinggi	Jumlah Dokumen leger Jalan Kota Bukittinggi	
3	Memberikan rasa aman terhadap bahaya banjir dan genangan	3.	Berkurangnya wilayah yang terkena dampak genangan /banjir	Persentase wilayah/ titik yang terkena dampak genangan/ banjir	Melakukan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pengendali banjir	Program Pengendalian Banjir	Persentase Pengurangan titik genangan
						Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/ Kali	Panjang Pengerukan Sungai / Kali
						Pembuatan Sumur Resapan	Jumlah sumur resapan yang dibuat
						Program Pengembangan, Pengelolaan & Konservasi Sungai, Danau dan Sumberdaya Air Lainnya	Persentase sungai yang terpelihara/ normalisasi
						Normalisasi Sungai	Panjang sungai yang dinormalisasi



					Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Persentase Pengamanan titik bahaya longsor
					Pemasangan Batu Bronjong/Dam bangunan	Panjang Batu Bronjong/Dam bangunan dibangun
					Pemasangan Batu Bronjong/Dam jalan	Panjang Pemasangan Batu Bronjong/Dam jalan
					Pembangunan Infrastruktur Kaw. Rawan Bencana	Pembangunan Infrastruktur Kaw. Rawan Bencana
4	Meningkatnya cakupan air irigasi untuk daerah pertanian	4. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana irigasi	Persentase wilayah cakupan irigasi yang terpenuhi	Menyiapkan perencanaan teknis serta mensosialisasikan rencana pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan irigasi	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya	Persentase DI yang beririgasi teknis
					Pembangunan Saluran Irigasi	Panjang Saluran Irigasi yang dibangun
					Rehab/ peningkatan Jaringan Irigasi	Panjang saluran irigasi yang di Rehab/ peningkatan
					Pemeliharaan Rutin Irigasi	Irigasi yang dipelihara
					Perencanaan DAK Irigasi	Jumlah perencanaan DAK irigasi yang dikerjakan
5	Meningkatkan pengelolaan pembangunan gedung.	5. Meningkatnya mutu dan umur teknis bangunan publik/ gedung pemerintah	Persentase gedung/ bangunan yang memenuhi standar layak fungsi	- Melakukan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan gedung / bangunan yang belum memenuhi standar layak huni	Program Pembangunan Sarana Sosial Kemasyarakatan dan Peningkatan Fasilitas Umum	jumlah pemenuhan kebutuhan gedung negara dan fasilitas umum
					Pembangunan Kantor Lurah	Jumlah kantor lurah yang dibangun
					Rehab Kantor Lurah	Jumlah kantor lurah yang direhab
					Pembangunan Kantor DPRD Kota Bukittinggi	Jumlah Kantor DPRD Kota Bukittinggi yang dibangun
					Pembangunan Kembali Rumah Dinas Walikota Bukittinggi	Jumlah rumah dinas Walikota Bukittinggi yang dibangun kembali



6					Rehab Gedung Parkir Ex Gloria	Jumlah gedung parkir Ex Gloria yang direhab
					Rehab Balai Pemuda	Jumlah balai pemuda yang direhab
					Rehabilitasi/ Pembangunan Kembali Pasar Atas	Tersedianya dokumen sebagai acuan rehabilitasi/ pembangunan kembali Pasar Atas
					Revitalisasi Kawasan Jam Gadang	Kawasan Jam Gadang yang direvitalisasi
					Program Pengelolaan Pembangunan Gedung	Persentase gedung negara dan swasta yang laik fungsi
					Operasionalisasi Perda Bangunan gedung	Terlaksananya Operasionalisasi Perda Bangunan gedung
				- Melakukan pelayanan advice planning , IUJK & Jasa Konstruksi	Program Pengaturan Jasa Konstruksi	Persentase tersedianya layanan informasi jasa konstruksi
					Pembinaan Jasa Konstruksi	Kegiatan Pembinaan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan
					Pembangunan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI)	Jumlah SIM yang dibangun/ di update
7	Pemenuhan target universal access (sanitasi dan air bersih)	6. Meningkatnya ketersediaan informasi dan perizinan jasa konstruksi	persentase masyarakat yang membangun sesuai advice planning yang dikeluarkan		Penyusunan Biaya Perencanaan Pekerjaan Fisik SKPD dengan Nilai Kecil dari 100.000.000	Paket perencanaan pekerjaan fisik SKPD dengan nilai kecil dari 100.000.000 tersusun
					Penyusunan Harga Satuan Konstruksi Kota Bukittinggi	Jumlah dokumen Harga Satuan Bangunan Gedung (HSBGN) Kota Bukittinggi yang tersusun
		7. Pemenuhan kebutuhan air bersih	persentase penduduk yang mendapatkan akses air bersih	Meningkatkan kapasitas produksi air baku air minum dengan melakukan inovasi terhadap sumber air untuk air minum	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman



				Pembuatan Sumur Bor	Jumlah sumur bor yang dibuat
				Pembangunan dan Revitalisasi Sarana Air Minum	Jumlah Sarana Air Minum yang dibangun dan direvitalisasi
				Pemeliharaan Sarana Air Minum	Jumlah sarana air minum yang dipelihara
				Pembangunan Sarana Sanitasi	Jumlah Sarana Sanitasi yang dibangun
				Pemeliharaan dan Revitalisasi Sarana Sanitasi	Jumlah Sarana Sanitasi yang dipelihara di direvitalisasi
				Pemberdayaan Sanitasi	Terlaksanannya Pemberdayaan Sanitasi
				Pembangunan toilet umum	Jumlah toilet umum yang dibangun
				Pembangunan iPLT dan IPAL	Jumlah IPLT dan IPAL yang dibangun
				Bantuan Pengujian Kualitas Air Baku Masyarakat	Jumlah Bantuan Pengujian Kualitas Air Baku Masyarakat yang terlaksana
				Pemipaan (SR) Masyarakat	Jumlah Pemipaan (SR) Masyarakat
				Operasi dan Pemeliharaan SPAM Panorama Baru	Terlaksanannya Operasi dan Pemeliharaan SPAM Panorama Baru
				Operasi dan Pemeliharaan SPAM Kayu Kubu	Terlaksanannya Operasi dan Pemeliharaan SPAM Kayu Kubu
				Operasi dan Pemeliharaan SPAM Labuah Batu (Bukit Apit)	Terlaksanannya Operasi dan Pemeliharaan SPAM Labuah Batu (Bukit Apit)
				Pamsimas	Terlaksanannya Pamsimas
8	Pemenuhan drainase layak	Persentase drainase perkotaan yang layak	Melakukan rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan drianse	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Persentase drainase perkotaan dengan kondisi baik



					Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong	Panjang Saluran Drainase / Gorong-Gorong yang dibangun
					Pemeliharaan Rutin Drainase Dalam Kota	Panjang Saluran Drainase / Gorong-Gorong yang dipelihara
					Peningkatan Drainase	Panjang Saluran Drainase / Gorong-Gorong yang ditingkatkan
					Pengembangan model dralingmas (Drainase lingkungan berbasis masyarakat)	Terlaksanannya Pengembangan model dralingmas (Drainase lingkungan berbasis masyarakat)
8	Pengendalian dan pemanfaatan ruang kota	9. Peningkatan penataan ruang dan ketaatan terhadap dokumen tata ruang	Kesesuain pemanfaatan ruang kota	- Melakukan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat agar memanfaatkan ruang kota sesuai dengan RTRW	Program Perencanaan Tata Ruang	persentase penyediaan informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah
				- Melakukan pendataan terhadap bangunan dalam kota	Pembuatan Keterangan Rencana Kota	Terlaksanannya Pembuatan Keterangan Rencana Kota
					Perubahan Sertifikat Tanah yang Terkena Pelepasan Hak	Jumlah Perubahan Sertifikat Tanah yang Terkena Pelepasan Hak
					Pendamping Penyusunan Perda RDTR Kota Bukittinggi	Jumlah Perda RDTR tersusun
					Sosialisasi Perda RDTR Kota Bukittinggi	Sosialisasi Perda RDTR Kota Bukittinggi terlaksana
					Sosialisasi Perda RTRW Kota Bukittinggi	Sosialisasi Perda RTRW Kota Bukittinggi terlaksana
					Sosialisasi Perda Bangunan Gedung Kota Bukittinggi	Sosialisasi Perda Bangunan Gedung Kota Bukittinggi terlaksana
					Lanjutan Penyusunan Perda RDTR Kota Bukittinggi	Jumlah penyusunan Perda RDTR Kota Bukittinggi dilanjutkan
					Pengadaan cetak peta tata ruang	Tersedianya peta tata ruang



					Pendataan Bangunan Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	Terlaksanannya Pendataan Bangunan Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	
					Pengadaan kelengkapan Studio Tata Ruang	Terlaksanannya Pengadaan kelengkapan Studio Tata Ruang	
					RTBL Kawasan Strategis	Jumlah RTBL kawasan strategis tersusun	
					Studi penataan ruang daerah	Studi komparasi penataan ruang daerah yang dilaksanakan	
					Penyusunan dan Pendataan Arsip – Arsip Tata ruang serta Digitalisasi Data	Jumlah Arsip dan digitalisasi data tata ruang yang tersusun dan terdata	
					Identifikasi dan Pemetaan Kawasan Ngarai Sianok	Jumlah kawasan Ngarai Sianok yang diidentifikasi dan dipetakan	
					Sistem Informasi Tata ruang	Tersedianya sitem informasi tata ruang	
			Pelanggaran pemanfaatan tata ruang yang dapat ditertibkan	Melakukan pendataam terhadap bangunan dalam kota	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Ketaatan terhadap tata ruang	
					Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan tentang Pembangunan	Jumlah kegiatan pengawasan/ pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan	
					Audit Pemanfaatan Ruang	Jumlah audit pemanfaatan ruang yang disusun	
					Pembuatan Billboard Tata Ruang	Jumlah billboard yang dibuat	
					Verifikasi dan penyelesain pengaduan masyarakat masalah bangunan	Jumlah Verifikasi dan penyelesain pengaduan masyarakat masalah bangunan	
9	Meningkatkan pelayanan publik di bidang pertanahan	10	Terciptanya pelayanan pertanahan yang berkualitas	Persentase pelayanan pertanahan sesuai SOP	Melakukan pengembangan informasi pertanahan dengan membuat arsip elektronik	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	Persentase ketersediaan informasi pertanahan



					Pembuatan Sistem Informasi Geografis Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Bukittinggi	Terlaksananya pembuatan aplikasi dan GIS tanah dan bangunan
					Kegiatan Pembuatan Arsip Elektronik	Tersedianya arsip elektronik pertanahan
					Program penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Persentase optimalisasi penataan, penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah
					Kegiatan Sertifikasi Aset Pemerintah Daerah	Jumlah sertifikat tanah milik pemerintah yang dapat diselesaikan/ diterbitkan
					Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pemerintah Kota Bukittinggi	tersedianya tanah untuk kepentingan Pemerintah Kota Bukittinggi
					Sosialisasi Pengadaan Tanah	Terlaksananya sosialisasi pengadaan tanah
		11	Selesainya konflik-konflik pertanahan pemerintah daerah	Persentase konflik pertanahan pemerintah daerah diselesaikan	Melakukan mediasi dan pendekatan dengan pihak-pihak yang memiliki konflik pertanahan dengan pemerintah daerah	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
						Persentase Kepastian hukum atas tanah aset daerah
					Kegiatan Penyelesaian Tanah Konsolidasi By Pass dan Masalah Tanah Masyarakat Lainnya	Masalah konsolidasi tanah by pass dan masalah tanah masyarakat lainnya yang dapat diselesaikan
					Program pelayanan administrasi perkantoran	Tingkat kelancaran admnistrasi perkantoran tiap tahunnya
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jenis surat menyurat
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening listrik/komunikasi yang yang dibayar
11	Presentase konflik pertanahan pemerintah daerah diselesaikan	Peningkatan kualitas pengelolaan SAKIP	Nilai SAKIP Dinas PUPR	Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi perkantoran secara efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku		



					Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional yang dilaksanakan
					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa Kebersihan Kantor yang dilaksanakan
					Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor dipelihara
					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang dibeli
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetak/penggandaan yang dilaksanakan
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kantor yang Komponen Instalasi Listrik / Penerangan dibeli
					Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman kantor yang dibeli
					Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	Persentase rapat/ koordinasi yang diikuti/ dihadiri
					Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Jumlah Pegawai Non PNS dibayar
					Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah Jasa pengamanan kantor yang dilaksanakan
					Pelaksanaan Proses administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah paket yang di proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
					Penunjang Operasional Pengelola Teknis Pelaksana Kegiatan Proyek	Jumlah paket yang ditunjang Operasional Pengelola Teknis Pelaksana Kegiatan Proyek
					Penunjang Operasional Kegiatan Ke PU an	Jumlah kegiatan lapangan yang dibayarkan honor/lembur
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat ketsediaan bangunan dan parsarana pendukung



					Pengadaan Perlengkapan Kantor	Pengadaan perlengkapan kantor yang disediakan
					Pengadaan Peralatan Kantor	terlaksananya pengadaan peralatan kantor
					Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan
					Pemeliharaan berkala gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan berkala Gedung Kantor dan Lanscape
					Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat ketsediaan pakaian dinas
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
					Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan laporam dan dokumen perencanaan SKPD/dinas
					Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun
					Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis 6 Bulan Berikutnya	Jenis dokumen Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis 6 Bulan Berikutnya
					Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kerja dan Keuangan SKPD
					Fasilitasi kegiatan DAK bidang ke PU an	Jumlah bidang DAK yang difasilitasi



